

MODUL

Inovasi Pemantauan
Untuk Peningkatan
Kinerja Program
Penanggulangan
Kemiskinan

Inovasi Pemantauan Untuk Peningkatan Kinerja Program Penanggulangan Kemiskinan

Rapat Kerja Teknis

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Tahun 2015

Daftar Isi

DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR SINGKATAN	v
PENDAHULUAN	1-3
KONSEP UMUM PEMANTAUAN DAN EVALUASI	5-15
Berbagai Metode yang Lazim Digunakan dalam Melakukan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Program	6-8
Metode Kualitatif dalam Monitoring dan Evaluasi Program	9-12
Apakah Metode Kualitatif?	9
Bagaimana Mengumpulkan Data Kualitatif?	9-10
Apakah Prinsip Pengumpulan Data Kualitatif?	10-11
Bagaimana Menjaga Kualitas Dalam Evaluasi Kualitatif?	11
Apakah Tantangan dan Pertimbangan dalam Evaluasi Kualitatif?	12
Metode Kuantitatif Untuk Pemantauan dan Evaluasi	12-15
Apakah Metode Kuantitatif?	12
Mengapa Metode Kuantitatif Penting untuk Monitoring dan Evaluasi?	12-13
Kapan Metode Kuantitatif digunakan?	13
Apa Saja Kelebihan dari Metode Kuantitatif?	14
Apa Saja Kelemahan dari Metode Kuantitatif?	14-15
Bagaimana Melakukan Penelitian dengan Metode Kuantitatif?	15
Apa yang Perlu Disiapkan untuk Menunjang Metode Kuantitatif?	15
PEMANFAATAN DATA PEMANTAUAN UNTUK KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	17-29
Mengapa kebijakan berbasis bukti penting?	18-19
Apa Prasyarat Utama dalam Mendukung Kebijakan Berbasis Bukti?	19
Bagaimana Menterjemahkan Identifikasi Masalah ke Dalam Intervensi Kebijakan yang Terukur?	20-22
<i>Studi Kasus Bantuan Siswa Miskin Tahun 2012</i>	20-29
Bagaimana Menggunakan Data Pemantauan Sebagai Alat	

Pengendalian Perbaikan Program BSM?	22-23
Apa Kebijakan yang diambil berdasarkan data pemantauan?	24-25
Pemantauan Studi Rintisan Perbaikan Program: Studi Kasus Raskin	26-29
Apa yang disebut dengan studi rintisan Program Raskin?	26
Bagaimana memantau implementasi perubahan Program Raskin 2012?	26
Bagaimana hasil pemantauan perubahan Program Raskin 2012?	26-29
Bagaimana hasil pemantauan ini dipergunakan dalam membantu memperbaiki kebijakan?	29
ACUAN KUNJUNGAN LAPANGAN UNTUK PEMANTAUAN PROGRAM	31-37
Kunjungan Lapangan sebagai Suatu Bentuk Pemantauan	32
Mengapa metode kunjungan lapangan paling direkomendasikan?	32
Apa yang diharapkan dari suatu kunjungan lapangan?	32
Apa yang bisa dilakukan dalam suatu kunjungan lapangan?	32
Persiapan Kunjungan Lapangan	33-37
Apa yang perlu dipersiapkan untuk suatu kunjungan lapangan?	33-35
Secara spesifik, dokumen apa yang bisa dijadikan sumber informasi dalam suatu kunjungan lapangan?	35-36
Bagaimana kunjungan lapangan dilaksanakan?	36
Apa yang tidak boleh dilakukan dalam suatu kunjungan lapangan?	36
Bagaimana cara agar wawancara dalam kunjungan lapangan berjalan efektif?	36
Bagaimana cara memperoleh informasi kunci dalam kunjungan lapangan?	36-37
Bagaimana hasil kunjungan lapangan dilaporkan?	37
INOVASI DALAM MELAKUKAN KEGIATAN LAPANGAN	39-43
Mengapa menggunakan ponsel pintar dan sabak elektronik untuk pencatatan di lapangan?	40-41
Bagaimana cara memilih aplikasi untuk pencatatan elektronik?	41
Apa saja yang diperlukan untuk membangun aplikasi pemantauan secara elektronik?	41-43
Apa kendala dan kekurangan menggunakan pencatatan elektronik?	43
Bagaimana cara menggunakan aplikasi pemantauan elektronik?	43
DAFTAR PUSTAKA	44-45
APPENDIX	46-55



Daftar Gambar

Gambar 2.1.	Fokus dan Indikator Pemantauan dan Evaluasi menurut Tahapan	7
Gambar 2.2.	Model Pernyataan Kondisi "If-Then"	8
Gambar 2.3.	Siklus Pemantauan dan Evaluasi	13
Gambar 3.1.	Empat Masalah Utama Kinerja Program BSM 2012	20
Gambar 3.2.	Perubahan Pensasaran Program BSM	21
Gambar 3.3.	Keinginan RTPM atas Sekolah Anak	22
Gambar 3.4.	Persentase Data Ganda Penerima BSM untuk Siswa SMP di Beberapa Provinsi	23
Gambar 3.5.	Poster Sosialisasi BSM	24
Gambar 3.6.	KPS Memperbaiki Kinerja Penetapan Sasaran	25
Gambar 3.7.	Jumlah Raskin yang dibeli Rumah Tangga (Kg)	28
Gambar 3.8.	Harga Raskin yang dibayarkan (Rp/kg)	28
Gambar 3.9.	Peta Kinerja Pensasaran Raskin	29
Gambar 4.1.	Bagan persiapan kunjungan lapangan	33
Gambar 4.2.	Contoh Alur Pertanyaan	34
Gambar 4.3.	Contoh Kuesioner	34

Daftar Tabel

Tabel 3.1.	Perubahan Harga dan Jumlah Beras dengan Penggunaan Kartu Raskin	27
------------	---	----

Daftar Singkatan

BSM	Bantuan Siswa Miskin
FGD	Focus Group Discussion
Juklak	Petunjuk Pelaksanaan
Juknis	Petunjuk Teknis
Kemendikbud	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kemenag	Kementerian Agama
KPS	Kartu Perlindungan Sosial
KK	Kartu Keluarga
MI	Madrasah Ibtidaiyah
Monev	Monitoring dan Evaluasi
Pedum	Pedoman Umum
PKH	Program Keluarga Harapan
P4S	Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial
Raskin	Beras untuk Rumah Tangga Miskin
RTS	Rumah Tangga Sasaran
RTSM	Rumah Tangga Sangat Miskin
SD	Sekolah Dasar
SKTM	Surat Keterangan Tidak Mampu
SOP	Standard of Operation
Susenas	Survei Sosial Ekonomi Nasional
TKPK	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
TNP2K	Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan





Pendahuluan

Pendahuluan

Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat.

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 menjelaskan bahwa program penanggulangan kemiskinan secara nasional meliputi kelompok program perlindungan sosial berbasis individu, keluarga atau rumah tangga; kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan kelompok masyarakat; kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan program-program lain yang secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

Peraturan Presiden tersebut juga mengamanatkan pembentukan lembaga koordinasi penanggulangan kemiskinan, yaitu Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di tingkat Pusat dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota, untuk saling bekerjasama satu sama lain. Pada prinsipnya kelembagaan ini dibentuk untuk memperbaiki kualitas koordinasi dan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di pusat maupun di daerah, sehingga efektivitas penanggulangan kemiskinan secara keseluruhan dapat lebih ditingkatkan.

Dalam konteks pengendalian pelaksanaan program nasional di daerah, fungsi utama yang perlu dijalankan oleh TKPK adalah memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program, khususnya untuk mengetahui kinerja realisasi pencapaian target, penyerapan dana, kendala yang dihadapi, serta implikasi perbaikan dan/atau pengembangan yang dibutuhkan untuk memperbaiki pelaksanaan program di masa yang akan datang. Dengan menjalankan fungsi pemantauan dan evaluasi ini, TKPK juga diharapkan dapat memperoleh informasi yang bermanfaat untuk mengembangkan inisiatif program daerah, selain untuk memperkuat sinergi antar program yang sudah berjalan.

Modul Inovasi Pemantauan Untuk Peningkatan Kinerja Program Penanggulangan Kemiskinan ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi TKPK dan segenap pemangku kepentingan lain dalam memaksimalkan peran masing-masing untuk mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah.

Bab 1 dari panduan ini terlebih dahulu menguraikan tentang konsep umum pemantauan dan evaluasi program, terutama untuk menjelaskan pengertian, tujuan dan manfaat, tahapan

serta prasyarat yang diperlukan untuk menjalankan suatu kegiatan pemantauan dan evaluasi. Kemudian, bab 2 menjelaskan tentang pemanfaatan data pemantauan dan kaitannya dengan kebijakan berbasis bukti. Selanjutnya, acuan dan tahapan dalam melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi melalui kegiatan lapangan dijelaskan pada Bab 3. Bab terakhir menguraikan tentang berbagai inovasi yang mulai dikembangkan untuk memfasilitasi kegiatan lapangan.





Konsep Umum Pemantauan dan Evaluasi Program

Mengapa pemantauan dan evaluasi program diperlukan?

Pemerintah bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan program publik. Kewajiban ini dapat dilakukan jika pemerintah mengetahui kekurangan dan kelemahan dalam penyelenggaraan pelayanan dan program itu sendiri. Sistem pemantauan dan evaluasi yang berfungsi baik adalah alat untuk menjawab kebutuhan tersebut.

Untuk apa pemantauan dan evaluasi program dilakukan?

Secara spesifik, pemantauan dan evaluasi bertujuan menghasilkan informasi mengenai kemajuan dan kualitas pelaksanaan pelayanan dan program; mengidentifikasi masalah dan potensi masalah dalam pelaksanaan pelayanan dan program; memberikan penilaian terhadap keberhasilan pelayanan dan program baik dari segi *output*, manfaat maupun dampaknya; dan menjelaskan keberhasilan, kekurangan atau kegagalan pelayanan dan program.

Apa perbedaan antara pemantauan dan evaluasi program?

Pemantauan dan evaluasi berbeda dalam setidaknya tiga hal pokok, yaitu fokus, pemanfaatan informasi dan pelaksanaannya.

1. Fokus pemantauan adalah pada proses, dengan membandingkan pelaksanaan dengan rencana/prosedur yang sudah ditentukan. Sedangkan, evaluasi meletakkan fokus pada keluaran, hasil dan dampak: mengacu pada tujuan, membandingkan kondisi sebelum dan sesudah program, menggunakan kelompok kontrol.
2. Informasi hasil pemantauan digunakan untuk mengendalikan pelaksanaan program. Sedangkan, informasi hasil evaluasi digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan dan masa depan program.
3. Pemantauan dilaksanakan oleh pengelola program atau pemangku kepentingan lain dari program yang bersangkutan. Sedangkan, evaluasi lebih sering dilakukan oleh lembaga di luar pengelola program, khususnya lembaga non-pemerintah.

Apa yang dihasilkan oleh pemantauan dan evaluasi program?

Proses pemantauan dan evaluasi akan menghasilkan informasi berupa analisis kebutuhan dan ketersediaan sumber daya; analisis indikator kinerja kunci dan implementasi program; serta evaluasi pelaksanaan, capaian dan efektivitas program.

Apa yang bisa dilakukan dengan hasil pemantauan dan evaluasi program?

Selain sebagai dasar untuk mengukur kuantitas, kualitas dan penargetan keluaran (*output*), informasi di atas ini dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*) dari keluaran tersebut.

Apa manfaat pemantauan dan evaluasi program bagi pemerintah?

Pemantauan dan evaluasi akan mendukung pengambilan kebijakan. Informasi hasil pemantauan dan evaluasi membantu pemerintah dengan menyediakan bukti-bukti yang berkaitan dengan efektivitas pelayanan dan program, baik dari segi biaya maupun hasil/dampak.

Dalam mendukung perluasan kebijakan dan program, informasi hasil pemantauan dan evaluasi dapat menggambarkan apakah suatu program layak dikembangkan dan bagaimana cara yang harus digunakan.

Pemantauan dan evaluasi juga membantu pemerintah dalam pengelolaan dan pengendalian kegiatan pada tingkat sektor, program dan proyek. Dalam konteks ini, informasi hasil pemantauan dan evaluasi membantu dalam mengidentifikasi permasalahan dan kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan program.

Manfaat lain yang tak kalah penting dari pemantauan dan evaluasi adalah meningkatkan transparansi dan menerapkan prinsip akuntabilitas publik. Informasi hasil pemantauan dan evaluasi menyediakan bukti dasar tentang bagaimana pemerintah mengelola sumber daya publik sebagai pertanggungjawaban terhadap masyarakat.

Apa fokus pemantauan dan evaluasi program?

Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan mengamati tahapan perencanaan, pelaksanaan maupun hasil program. Dalam setiap tahapan, terdapat fokus pengamatan dengan indikator tertentu menurut jenis program. Seperti terlihat pada Gambar 2.1, dalam tahapan perencanaan, fokus pengamatan adalah masukan (*input*) program dengan indikator sumberdaya yang mencakup anggaran, sumberdaya manusia dan rencana kerja.

Gambar 2.1. Fokus dan Indikator Pemantauan dan Evaluasi menurut Tahapan



Dalam tahapan pelaksanaan, fokus pengamatan adalah proses (kegiatan) program, dengan indikator pelaksanaan seperti pencapaian sasaran, penerapan prosedur dan regulasi. Sedangkan, dalam tahapan hasil, fokus pengamatan meliputi keluaran (*ouput*), manfaat (*outcome*) dan dampak (*impact*) program.

Sebagai ilustrasi, keluaran dari program pembangunan prasarana air bersih adalah terbangunnya jaringan air bersih; manfaatnya dapat ditunjukkan oleh jumlah rumah tangga yang memperoleh akses air bersih; dan dampaknya dapat diukur dari pengurangan jumlah penduduk yang terkena penyakit dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

Bagaimana memahami hubungan antara masing-masing fokus pemantauan dan evaluasi?

Logika yang menghubungkan masing-masing fokus pengamatan, dari masukan (*input*) sampai dampak (*impact*) program dapat lebih mudah dibangun dengan menggunakan model pernyataan kondisi “If-Then” (jika-maka), seperti yang diilustrasikan pada Gambar 2.2.

Gambar 2.2. Model Pernyataan Kondisi “If-Then”



Dalam contoh kasus suatu program verifikasi dan sosialisasi bantuan kesehatan bersyarat, jika *input* sumberdaya telah tersedia, maka proses verifikasi dan sosialisasi dapat dilaksanakan. Jika proses verifikasi dan sosialisasi telah dilakukan, maka keluaran dapat diperoleh, yaitu Rumah Tangga Sasaran (RTS) mengetahui dan mematuhi kewajibannya dan dana tersalurkan. Jika Rumah Tangga Sasaran (RTS) telah mengetahui dan mematuhi kewajibannya dan dana telah tersalurkan, maka akses terhadap posyandu dan fasilitas kesehatan lainnya dapat ditingkatkan. Jika akses terhadap posyandu dan fasilitas kesehatan lainnya telah meningkat, maka kualitas kesehatan RTS dapat ditingkatkan.

Berbagai Metode yang Lazim Digunakan dalam Melakukan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Program

Metode Kualitatif dalam Monitoring dan Evaluasi Program

Apakah Metode Kualitatif?

Metode kualitatif adalah sebuah metode yang digunakan dalam sebuah penelitian kualitatif atau penelitian mixed-method¹ yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mengenai fenomena kehidupan sosial dan budaya melalui deskripsi mendalam atas suatu gejala.

Tujuan penggunaan metode kualitatif dalam evaluasi adalah menjawab pertanyaan mengapa sebuah program dapat atau tidak dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan, bagaimana proses pelaksanaan program tersebut, bagaimana proses perubahan terjadi, serta mencoba menguak keterkaitan antara proses pelaksanaan program dengan hasilnya.

Pertanyaan penelitian kualitatif digunakan untuk mencari pemahaman atas suatu gejala, dan lebih luas cakupannya daripada pertanyaan penelitian kuantitatif. Akan tetapi, pertanyaan tersebut harus cukup spesifik untuk memberitahu pembaca apa yang sedang dikaji. Misalnya, "Bagaimana pelaksanaan Program Bantuan Siswa Miskin dengan menggunakan mekanisme kartu dalam konteks sosial dan budaya di wilayah Indonesia Timur?" Pertanyaan tersebut mengidentifikasi topik (pelaksanaan Program Bantuan Siswa Miskin), periode waktu (setelah menggunakan mekanisme kartu), dan dari perspektif kepentingan (para pelaksana program dimana dalam pelaksanaan programnya kemungkinan berkorelasi dengan faktor sosial dan budaya setempat).

Bagaimana Mengumpulkan Data Kualitatif?

Setelah pertanyaan penelitian dirumuskan, data dapat dikumpulkan dari sumber-sumber yang tepat. Kekuatan dari penelitian kualitatif adalah keragaman teknik pengumpulan dan sumber data yang dapat digunakan, seperti pengamatan terlibat, wawancara tatap muka, wawancara telepon, diskusi kelompok terarah, video, observasi, buku harian, sejarah lisan, maupun dokumen sejarah (Corbin dan Strauss, 2008).

Wawancara kualitatif biasanya semi-terstruktur. Pewawancara memiliki fokus tetapi juga

¹ Penjelasan mengenai pendekatan *mixed-method* dijelaskan dalam "Ikhtisar Metodologi: Pendekatan *Mixed-Method* dalam Evaluasi Dampak", Bahan Lokakarya Monitoring dan Evaluasi, TNP2K, Yogyakarta 2015.



diberikan fleksibilitas dalam melakukan wawancara (Bamberger et al., 2006). Dalam wawancara semi-terstruktur pewawancara umumnya memiliki daftar pertanyaan dan panduan diskusi, tetapi urutan pertanyaan yang diajukan tidak kaku dan dapat disesuaikan dengan kondisi ketika wawancara berlangsung. Pewawancara dimungkinkan untuk mengajukan pertanyaan tambahan di luar pedoman wawancara untuk mendalami suatu tema yang muncul ketika wawancara berlangsung yang masih berkaitan dengan pertanyaan penelitiannya (Berg, 1998).

Apakah Prinsip Pengumpulan Data Kualitatif?

Peneliti adalah instrumen utama penelitian kualitatif karena sejauh mana data dan informasi dikumpulkan sangat tergantung pada kemampuan peneliti mengumpulkannya. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam mengumpulkan data kualitatif adalah:

Kerahasiaan.

Sama halnya seperti jenis penelitian yang lain, dalam pengumpulan data kualitatif, informan dapat meminta pada peneliti untuk menjaga kerahasiaan identitas informan.

Proses timbal balik.

Pewawancara harus menyadari bahwa ia merupakan bagian aktif dari proses wawancara (Corbin dan Strauss, 2008) sehingga pewawancara dapat menghindari bias dan atau mengarahkan informan untuk menjawab sesuai dengan yang diinginkan oleh peneliti.

Membangun hubungan baik dengan informan.

Pada kajian yang menggunakan metode kualitatif, membangun hubungan yang baik dengan para informan sangat esensial karena dengan memiliki hubungan yang baik, informasi yang didapatkan akan lebih kaya, dalam, dan apa adanya atau tidak manipulatif.

Rekaman.

Rekaman audio sering digunakan dalam proses wawancara (Creswell, 2007) dan kemudian dapat ditranskrip.. Dalam melakukan rekaman, pewawancara harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari informan.

Pertanyaan.

Pertanyaan yang digunakan dalam wawancara biasanya menggunakan pertanyaan terbuka (Kaplan dan Saccuzzo, 2009), kebalikannya dengan pertanyaan dalam kuesioner yang biasanya menggunakan pertanyaan tertutup dengan beberapa pilihan jawaban (bandingkan antara "Ceritakan tentang pengalaman Anda berpartisipasi dalam program ini" dan "Apakah anda berpartisipasi dalam program ini?"). Selain itu, pertanyaan terbuka pun digunakan untuk menjaga interaksi antara pewawancara dan informan tetap mengalir.

Sensitif dan mampu beradaptasi dengan budaya informan.

Bahasa dan budaya dari orang yang diwawancarai harus diperhatikan (Bamberger et al., 2006) ketika akan melakukan wawancara. Jika memungkinkan, informan harus diwawancarai dalam bahasa mereka sendiri.

Pengambilan Sampel.

Purposive sampling sering digunakan dalam metode kualitatif karena fokusnya lebih pada pemahaman daripada generalisasi (Creswell, 2007). Penentuan informan dan termasuk daerah penelitian pun lebih menekankan pada kebutuhan menjawab pertanyaan penelitian dengan mempertimbangkan keterwakilan karakteristik tertentu, seperti jenis kelamin, status sosial, fungsi dan peran, dan usia.

Bagaimana Menjaga Kualitas Dalam Evaluasi Kualitatif?

Kualitas penelitian kualitatif bertumpu pada bagaimana data dikumpulkan dan dianalisis (Tracy, 2010). "Kepercayaan" adalah istilah umum dalam evaluasi kualitatif dan berkaitan erat dengan istilah "validitas" dalam penelitian kuantitatif (Marshall dan Rossman, 2011).

Beberapa saran untuk meningkatkan kepercayaan, yaitu:

Triangulasi.

Konsep ini mengacu pada pemeriksaan silang data (Shwandt, 2007). Triangulasi mengurangi potensi bias sistematis yang dapat terjadi dengan hanya menggunakan satu sumber data, metode, atau prosedur (Maxwell, 2008). Triangulasi dapat dilakukan melalui penggunaan berbagai sumber data (misalnya, fasilitator, peserta, dan pengamatan), beberapa teknik pengumpulan data (misalnya, wawancara, diskusi kelompok terarah, dan observasi), beberapa pengumpul data (misalnya, lebih dari satu peneliti), beberapa teori (misalnya, menggunakan teori dari berbagai disiplin ilmu), atau mengkolaborasikan dengan pendekatan lain, yaitu pendekatan kuantitatif dalam mixed-method (Bamberger et al., 2006; Creswell, 2007; Tracy, 2010).

Penggunaan teori dan konsep.

Teori dan konsep yang ada dapat digunakan untuk memandu penelitian kualitatif (Malterud, 2001). Kerangka teoritis juga dapat membantu dalam memberikan penjelasan dan pemahaman yang lebih dalam ketika menginterpretasikan hasil studi kualitatif.

Validasi.

Validasi adalah proses pengecekan dengan informan mengenai keakuratan data dan interpretasi (Creswell 2007; Tracy 2010). Sebelum hasil studi kualitatif tersebut dipublikasikan, informan diberikan kesempatan untuk meninjau salinan data studi dan hasil analisa (misalnya, tema yang muncul dari hasil pengumpulan data) dan memberikan masukan pada peneliti.



Apakah Tantangan dan Pertimbangan dalam Evaluasi Kualitatif?

Perencanaan seluruh proses sejak awal dapat meningkatkan koherensi dalam desain dan prosedur (Maxwell, 2009) evaluasi kualitatif. Rencana tersebut harus mencakup kerangka waktu yang realistis untuk melakukan wawancara, transkrip, *coding*, analisa data, dan penulisan laporan. Selain itu, studi kualitatif membutuhkan peneliti kualitatif yang tidak cukup hanya diberikan pelatihan selama satu minggu saja melainkan harus memiliki 'jam terbang' yang tinggi atau dengan kata lain, memiliki pengalaman yang mumpuni dalam melakukan studi kualitatif.

Ketika data kualitatif dikumpulkan dan dianalisis, peneliti harus berhati-hati dalam membahas implikasi dan temuan umumnya karena tujuan penelitian kualitatif berbeda dari penelitian kuantitatif. Dalam hal evaluasi program, hasil dari studi kualitatif bukan bertujuan untuk membuat generalisasi mengenai dampak dari sebuah program, tetapi untuk memberikan pemahaman mengenai mengapa dan bagaimana capaian program dihasilkan dan mengapa program memiliki dampak tertentu.

Metode Kuantitatif Untuk Pemantauan dan Evaluasi

Bagian ini membahas metode kuantitatif untuk kegiatan monitoring dan evaluasi, khususnya membahas mengapa metode ini digunakan, kapan digunakan, serta kelemahan dan kelebihanannya.

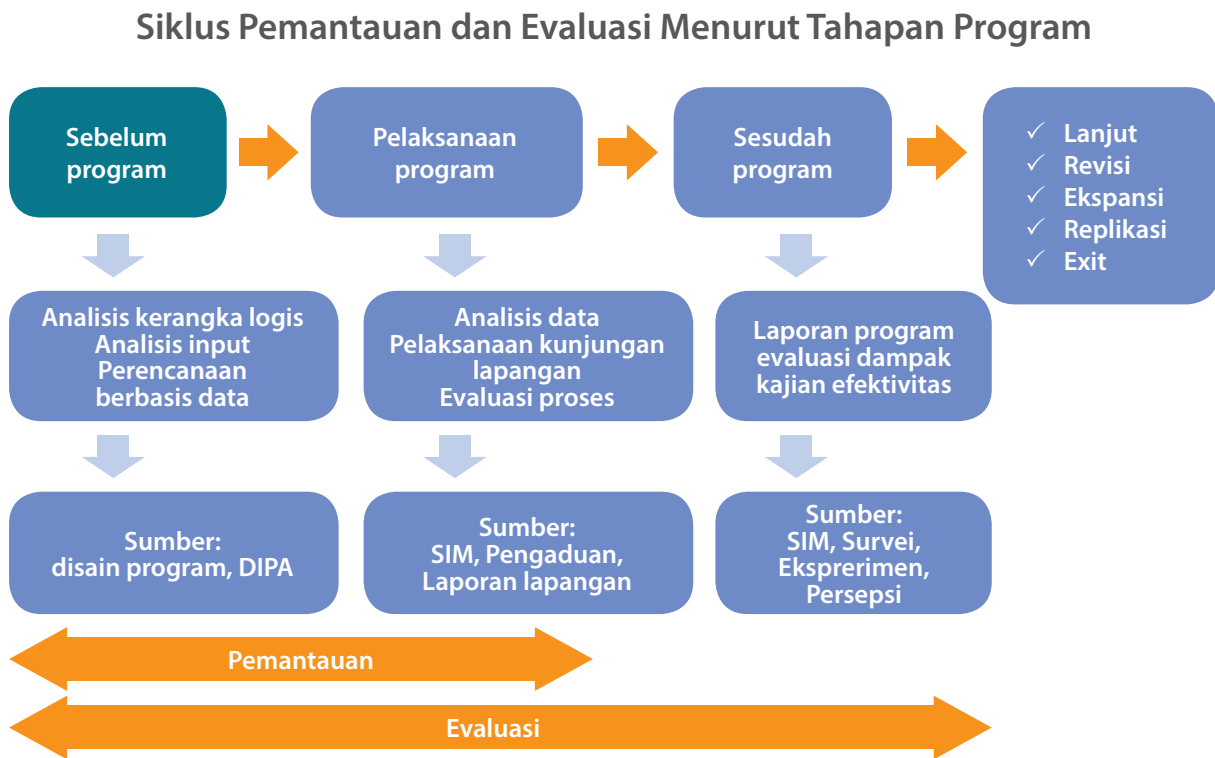
Apakah Metode Kuantitatif?

Metode kuantitatif merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk monitoring dan evaluasi program. Metode kuantitatif menekankan pada pengukuran yang bersifat objektif dengan mengandalkan alat analisis kuantitatif seperti statistik dan ekonometrik terhadap data yang dikumpulkan melalui survei. Hasil dari analisis data tersebut digunakan untuk membuat generalisasi temuan dan untuk menjelaskan gejala tertentu.

Mengapa Metode Kuantitatif Penting untuk Monitoring dan Evaluasi?

Pemerintah selaku pengambil kebijakan dan pemilik program selalu berhadapan pada berbagai pilihan kebijakan yang memerlukan kajian yang menyeluruh dan akurat. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) menyediakan informasi terkait kualitas pelaksanaan di lapangan sehingga pengelola program atau kebijakan dapat mengendalikan pelaksanaan program (gambar 2.3). Metode kuantitatif sangat efektif dalam memberikan informasi yang sifatnya deskriptif sebagai acuan bagi pengelola program mengenai pelaksanaan program. Selain itu, analisis dengan menggunakan metode kuantitatif juga penting untuk memberikan estimasi dampak dari suatu program.

Gambar 2.3. Siklus Pemantauan dan Evaluasi



Manfaat utama dalam melakukan riset kuantitatif adalah kemampuan dari teknik kuantitatif untuk mengisolasi hubungan dari satu variabel bebas dengan variabel penjelas yang menunjukkan hubungan sebab akibat. Metode kuantitatif sangat mengandalkan pada analisis yang berdasarkan pada angka-angka (numerik), logika matematis, serta ukuran dan model statistik, sehingga dianggap cukup objektif dan dapat digeneralisasi pada konteks yang lebih luas apabila asumsi-asumsi yang mendasari model yang dikembangkan tersebut dapat terpenuhi.

Kapan Metode Kuantitatif digunakan?

Metode kuantitatif biasa digunakan untuk menguji kebenaran dari suatu hipotesis. Keunikan dari penggunaan metode kuantitatif adalah kemampuan untuk mengukur derajat asosiasi maupun korelasi antara dua atau lebih variabel, hingga mengidentifikasi hubungan sebab akibat, sehingga dapat memberikan jawaban akan besaran dampak dari suatu program. Meskipun demikian, metode kuantitatif tidak bisa menjawab pertanyaan yang bersifat terperinci dan konteks spesifik, atau pertanyaan ‘mengapa’ dan ‘bagaimana’.

Metode kuantitatif biasa digunakan untuk menguji kebenaran dari suatu hipotesis. Metode ini bisa memberikan informasi besaran dampak dari suatu program.



Apa Saja Kelebihan dari Metode Kuantitatif?

Kultar (2007), Sharpe (2008), dan Babbie (2010) mendokumentasikan kelebihan utama dari metode kuantitatif dibandingkan dengan pendekatan metode lainnya. Sejumlah kelebihan tersebut adalah:

- Dengan jumlah dan ukuran sampel responden yang besar, studi kuantitatif memberikan ruang untuk melakukan studi yang lebih luas dan bersifat umum.
- Analisis dengan menggunakan teknik-teknik yang berdasarkan pada angka perhitungan statistik dan ekonometrik dapat memberikan hasil yang akurat dan objektif.
- Data kuantitatif yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik statistik untuk menggeneralisasi temuan.
- Karena standarisasi teknik kuantitatif yang kuat, hasil riset menggunakan metode kuantitatif dapat direplikasi, dianalisis, dan dibandingkan dengan studi serupa lainnya.
- Personal bias dapat dihindari karena metode kuantitatif tidak mengandalkan kepada "kedekatan" dengan responden dalam menggali temuan.

Apa Saja Kelemahan dari Metode Kuantitatif?

Berikut ini adalah beberapa kelemahan menggunakan teknik/metode kuantitatif.

- Metode kuantitatif seringkali kehilangan konteks yang lebih rinci, misalnya karakteristik lokal dari berbagai daerah. Kelompok responden seringkali diabaikan dan direduksi menjadi suatu informasi yang bersifat agregat.
- Pendekatan kuantitatif sangat mengandalkan pada metode yang kaku dan statis sehingga kurang fleksibel dalam menggali temuan-temuan lain terkait topik penelitian.
- Temuan penelitian pada umumnya terbatas pada deskripsi numerik untuk menguji hypothesis dari model yang telah dibangun. Temuan menjadi sangat terbatas dalam narasi yang lebih rinci terkait persepsi, perilaku, dan elaborasi lebih lanjut dari jawaban responden.
- Penelitian kuantitatif pada berbagai aplikasinya berusaha memanipulasi kejadian di dunia nyata untuk direduksi ke dalam bentuk "laboratorium" dimana terdapat kelompok yang terkena intervensi dan kelompok yang tidak terkena dampak sehingga kemudian dapat mengisolasi dampak dari intervensi. Karena mengandalkan pada informasi berdasarkan pada teknik komputasi statistik dalam menggeneralisasi temuan, maka ukuran dan tata cara pengambilan sampel menjadi sangat penting.
- Penelitian kuantitatif pada berbagai aplikasinya berusaha memanipulasi kejadian di dunia nyata untuk direduksi ke dalam bentuk "laboratorium" dimana terdapat kelompok yang terkena intervensi dan kelompok yang tidak terkena dampak sehingga kemudian dapat mengisolasi dampak dari intervensi. Karena mengandalkan pada informasi berdasarkan pada teknik komputasi statistik dalam menggeneralisasi temuan, maka ukuran dan tata cara pengambilan sampel menjadi sangat penting.

- Ukuran sampel yang besar seringkali menjadi tantangan utama terutama untuk kesediaan anggaran dan kegiatan supervisi untuk memastikan kualitas pengumpulan data yang baik.
- Desain studi tidak fleksibel terhadap perubahan di lapangan. Agar supaya studi kuantitatif dapat menghasilkan hasil yang optimal, segala aspek dari pengumpulan data direncanakan dan dirancang dengan hati hati dan dengan aturan yang ketat.

Bagaimana Melakukan Penelitian dengan Metode Kuantitatif?

Tahap pertama dari penggunaan pendekatan kuantitatif adalah pengumpulan data yang baik. Pengumpulan data kuantitatif dapat berdasarkan pada suatu kegiatan survei yang dirancang secara spesifik, dan atau dalam bentuk data administrasi yang dikumpulkan secara rutin. Tahap kedua, informasi dari berbagai indikator dari studi kuantitatif diklasifikasikan ke dalam variabel bebas maupun terikat, untuk kemudian direpresentasikan ke dalam suatu model statistik sehingga dapat menjelaskan pola data yang diamati.

Apa yang Perlu Disiapkan untuk Menunjang Metode Kuantitatif?

Perencanaan studi kuantitatif yang baik untuk monitoring dan evaluasi memerlukan berbagai komponen, yaitu:

- Dukungan logistik yang cukup. Dasar dari analisis kuantitatif adalah jumlah sampel yang besar sehingga perlu dukungan sumber daya (dana, waktu, dan manusia) yang memadai.
- Perencanaan dan desain studi yang matang termasuk penyusunan kerangka logis (*logical framework*) dan teori perubahan (*Theory of Change*) yang telah mencakup indikator-indikator keluaran dan indikator dampak, termasuk teori yang mendasari hubungan antar variabel tersebut.
- Tersedianya kualitas data yang baik, primer maupun sekunder, menjadi sangat penting dan mendasar demi menghindari bias dan kesalahan yang sistematis.
- Untuk mendukung analisis kuantitatif yang baik, diperlukan juga sumber daya manusia yang cakap dalam memetakan pola, melakukan analisis statistik dan ekonometrik, dan menerjemahkan temuan ke dalam rekomendasi kebijakan yang terperinci.





Pemanfaatan Data Pemantauan Untuk Kebijakan Pembangunan

Kebijakan berbasis bukti : Memanfaatkan data untuk arah kebijakan

Kebijakan berbasis bukti (*evidence based policy*) merupakan kebijakan yang dirumuskan berdasarkan kajian mendalam serta penelitian-penelitian pendukung dengan menempatkan bukti terbaik sebagai dasar untuk membantu pengambil keputusan memperoleh informasi penuh mengenai kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan kebijakan pembangunan dan pelaksanaannya (Sumarto, 2015).

Mengapa kebijakan berbasis bukti penting?

Menurut Shaxton (dalam Sutcliffe dan Court, 2005), terdapat beberapa alasan mengapa bukti (*evidence*) diperlukan dalam pengambilan kebijakan, antara lain:

1. Agar memahami lingkungan kebijakan dan bagaimana perubahannya.
2. Memahami efek yang dapat terjadi dari perubahan kebijakan, sehingga pengambil kebijakan dapat memilih kebijakan yang akan diambil dan menilai dampak-dampaknya.
3. Menentukan hubungan antara arahan strategis (*strategic direction*), hasil yang diinginkan (*intended outcomes*), dan tujuan kebijakan (*policy objectives*), untuk menunjukkan bahwa terdapat alasan yang jelas dan argument kuat yang disertai oleh bukti antara apa yang diharapkan dan apa yang sedang dilakukan saat ini.
4. Menentukan apa yang harus dilakukan dalam rangka memenuhi sasaran strategis (*strategic goals*) atau tujuan antara (*intermediate objectives*).
5. Mempengaruhi pemangku kepentingan agar mendukung pencapaian tujuan kebijakan.

Menurut Sumarto (2015), kebijakan berbasis bukti memiliki nilai lebih dibandingkan dengan kebijakan yang diambil melalui basis lainnya (misalnya: kebijakan berbasis opini), karena beberapa hal, antara lain:

- Kebijakan berbasis bukti lebih efektif dan efisien dalam mencapai hasil yang diharapkan, dibandingkan dengan kebijakan dengan basis lainnya. Efektivitas dapat dicapai karena pengambilan kebijakan didasarkan kepada hasil penelitian yang bersumber kepada data atau fakta, yang diolah dengan menggunakan metode ilmiah. Efisiensi dapat dicapai karena kebijakan yang diambil tidak berdasarkan *trial-and-error* atau dugaan yang dapat menyebabkan meningkatnya biaya.
- Kebijakan berbasis bukti lebih dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*), karena setiap anggota masyarakat dapat mengetahui bagaimana langkah dan proses pengambilan kebijakan tersebut dilakukan.
- Kebijakan berbasis bukti dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, bahwa kebijakan yang diambil dapat meningkatkan kesejahteraan mereka, melalui bukti-bukti hasil penelitian yang ada.
- Kebijakan berbasis bukti berorientasi pelayanan publik, di mana tidak didasarkan kepada kepentingan salah satu pihak tertentu.

Apa Prasyarat Utama dalam Mendukung Kebijakan Berbasis Bukti?

Ada Tiga Elemen utama kebijakan berbasis Bukti yang diperlukan :

1. **Bukti Empiris**, kemampuan Mengidentifikasi, Mengumpulkan, dan Mengembangkan informasi yang tersedia (Kuantitatif maupun Kualitatif).
2. **Analisis**, kemampuan menggunakan bukti empiris yang tersedia dalam rangka evaluasi kualitas implementasi kebijakan.
3. **Advokasi**, berdasarkan pada dua elemen: Bukti empiris dan Analisis, terlibat aktif dalam kegiatan Perencanaan Kebijakan Pembangunan, Pemantauan dan evaluasi efektivitas anggaran serta efektivitas kebijakan.

Dengan demikian, agar kebijakan berbasis bukti dapat berjalan dengan efektif, perlu diperhatikan dan ditingkatkan hal-hal berikut ini:

1. Apresiasi dan kesadaran pemangku kepentingan, terutama pengambil kebijakan dan masyarakat umum, terhadap pentingnya metode ilmiah dan hasil penelitian dalam proses pengambilan kebijakan. Kebijakan berbasis bukti memerlukan informasi dari para pemangku kepentingan, yang sering kali dikumpulkan melalui berbagai survei atau pendataan.
2. Tersedianya sumber daya yang diperlukan dalam pengumpulan data yang diperlukan, termasuk sumber daya manusia dan sumber daya finansial.
3. Tersedianya data untuk melakukan analisis. Data dapat diambil secara langsung dari masyarakat, atau melalui lembaga resmi pemerintah.
4. Tersedianya sumber daya yang diperlukan untuk melakukan analisis terhadap data. Analisis data merupakan langkah yang sangat penting, karena kebijakan yang diambil merupakan implementasi dari analisis data ini.
5. Hubungan antar-lembaga yang baik. Sering kali institusi tempat pengambil kebijakan tidak memiliki sumber daya yang mencukupi dalam melaksanakan kebijakan berbasis bukti. Sumber daya tersebut dapat diperoleh melalui kerjasama antar-lembaga.

Seiring dengan semakin meningkatnya kapasitas akademik dari para pengambil keputusan di pemerintahan, yang disertai dengan tersedianya data pendukung dalam melakukan analisis, kebijakan berbasis bukti semakin dapat diterima dan dilaksanakan. kesadaran pemangku kepentingan terhadap pentingnya penelitian, seperti studi awal (*background study*) atau pengumpulan data, sebelum pengambilan kebijakan dilakukan. Di samping itu, meningkatnya kapasitas akademik para pengambil keputusan ini juga mempermudah proses penerimaan dan penerapan hasil penelitian yang dilakukan oleh para peneliti, karena apresiasi para pengambil keputusan terhadap hasil penelitian juga meningkat.



Bagaimana Menterjemahkan Identifikasi Masalah ke Dalam Intervensi Kebijakan yang Terukur? - Studi Kasus Bantuan Siswa Miskin Tahun 2012

Pertama, melakukan identifikasi masalah pada kinerja program. Pada tahun 2011, Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) melakukan evaluasi Program Bantuan Siswa Miskin dengan menggunakan data Susenas, terdapat empat masalah utama dari kinerja program sebagaimana terlihat pada gambar 3.1 berikut.

Gambar 3.1. Empat Masalah Utama Kinerja Program BSM 2012



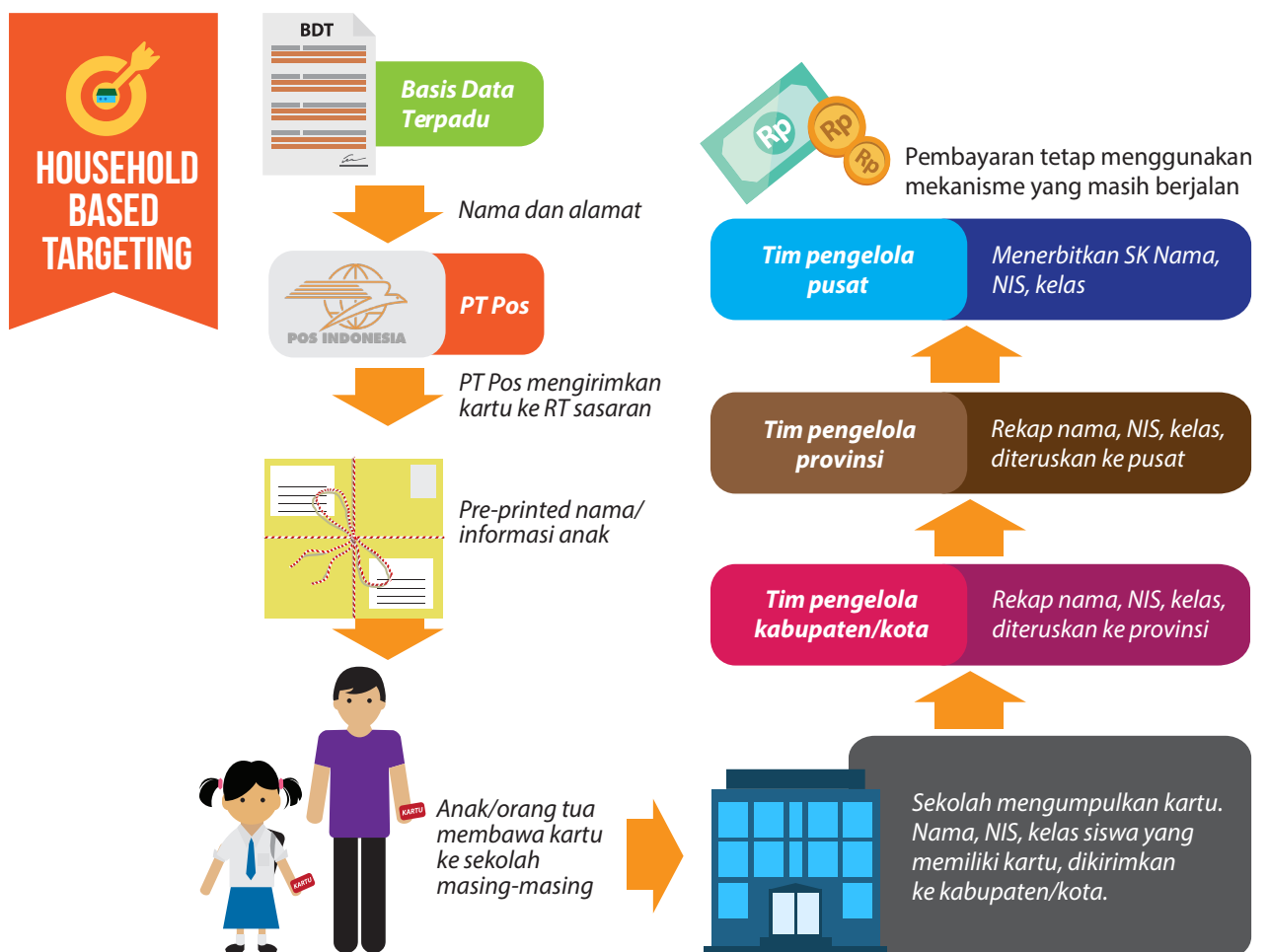
Kedua, Berdasarkan hasil identifikasi masalah tersebut, TNP2K menyarankan beberapa perubahan dalam proses bisnis BSM. (a) adalah perubahan dari pemasaran berbasis sekolah menjadi pemasaran berbasis rumah tangga. Dengan memanfaatkan Basis data terpadu di TNP2K, pemerintah mengirimkan kartu BSM dan kartu perlindungan sosial (KPS) sebagai

² Tahun 2012, Kemendikbud bekerjasama dengan PT. Pos Indonesia sebagai lembaga penyalur dana BSM, kemudian di tahun 2013, lembaga penyalur BSM berubah menjadi Bank Daerah/Asbanda dan di tahun 2014, lembaga penyalur BSM adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI).

penanda rumah tangga penerima bantuan sosial dimana didalamnya tercantum informasi individu anak termasuk nama, alamat, nama orang tua yang dapat menerima BSM. Semua anak dalam rumah tangga miskin yang menerima KPS dan bersekolah, dapat mendaftarkan dirinya ke sekolah sebagai calon penerima BSM dengan membawa KPS dan dokumen pendukung lainnya seperti Kartu Keluarga (KK). Seluruh data calon penerima BSM di sekolah/madrasah dikirimkan oleh sekolah/madrasah ke Dinas Pendidikan/Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang kemudian akan menggabungkan seluruh data siswa calon penerima BSM tersebut untuk dikirimkan kepada Kemendikbud/Kemenag.

(b) Nilai manfaat BSM pada Tahun Pelajaran (TA) 2013/2014 dinaikkan kurang lebih sebesar 30% untuk setiap jenjang. Selanjutnya sebelum 2012, mekanisme penyaluran dana BSM dilakukan secara langsung oleh Kemendikbud/Kemenag ke Sekolah/Madrasah. Tahun 2012, mekanisme penyaluran dana BSM disempurnakan. Dana BSM tidak lagi disalurkan melalui sekolah, namun langsung ke tangan siswa, baik pembayaran tunai melalui kantor pos ataupun melalui rekening bank².

Gambar 3.2. Perubahan Pensasaran Program BSM



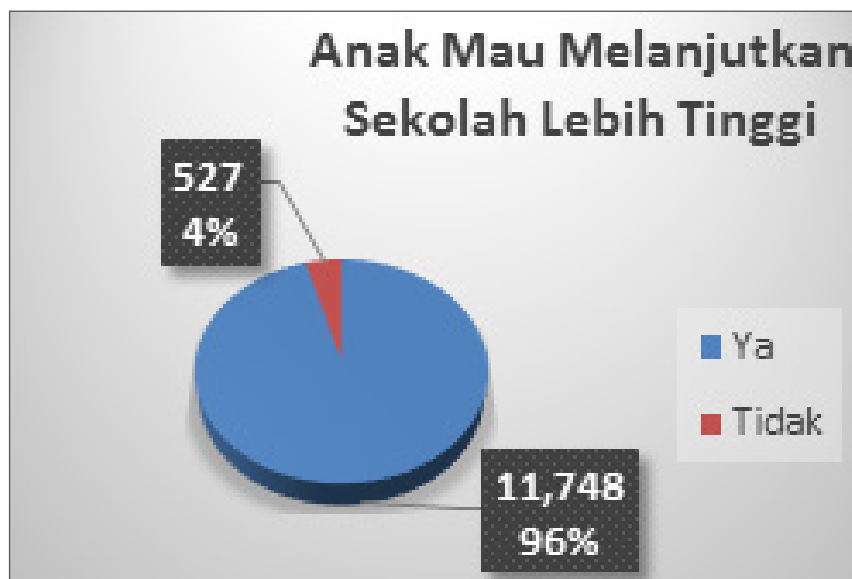
Serangkaian perubahan dalam proses bisnis tersebut perlu untuk dipantau oleh pemerintah untuk memastikan setiap tahapan dapat berjalan dengan baik. Untuk memantau perbaikan program BSM desain pemantauan menggunakan berbagai sumber data.

- Untuk memantau perubahan yang terjadi pada kualitas pensasaran digunakan modul khusus tentang perlindungan sosial yang disandingkan dengan survei SUSENAS dengan jumlah sampel *representative* di tingkat provinsi.
- Untuk memantau implementasi di lapangan, diadakan serangkaian survei yang berupaya menangkap dan memantau setiap tahapan proses di lapangan, seperti jumlah siswa yang menerima KPS/kartu BSM, hingga jumlah siswa yang membawa kartu ke sekolah dan berapa jumlah penerima KPS/Kartu BSM yang masuk ke dalam daftar akhir penerima program BSM.

Bagaimana Menggunakan Data Pemantauan Sebagai Alat Pengendalian Perbaikan Program BSM?

Data hasil pemantauan menunjukkan bahwa terdapat beberapa permasalahan dalam proses perbaikan bisnis proses BSM. **Pertama**, data administratif program BSM menunjukkan bahwa jumlah KPS yang direkapitulasi oleh dinas masih cukup rendah hingga akhir oktober 2013, hal ini bertolak belakang dengan data lain bahwa rumah tangga calon penerima bantuan memiliki persepsi yang positif tentang pendidikan, 96 persen rumah tangga penerima manfaat berkeinginan agar anaknya tetap bersekolah di jenjang lebih tinggi dan dari sejumlah rumah tangga yang tidak menyekolahkan anak 47 persen menyatakan bahwa salah satu alasan anak tidak sekolah adalah kurangnya biaya, seperti terlihat pada gambar 3.3. di bawah ini.

Gambar 3.3. Keinginan RTPM atas Sekolah Anak

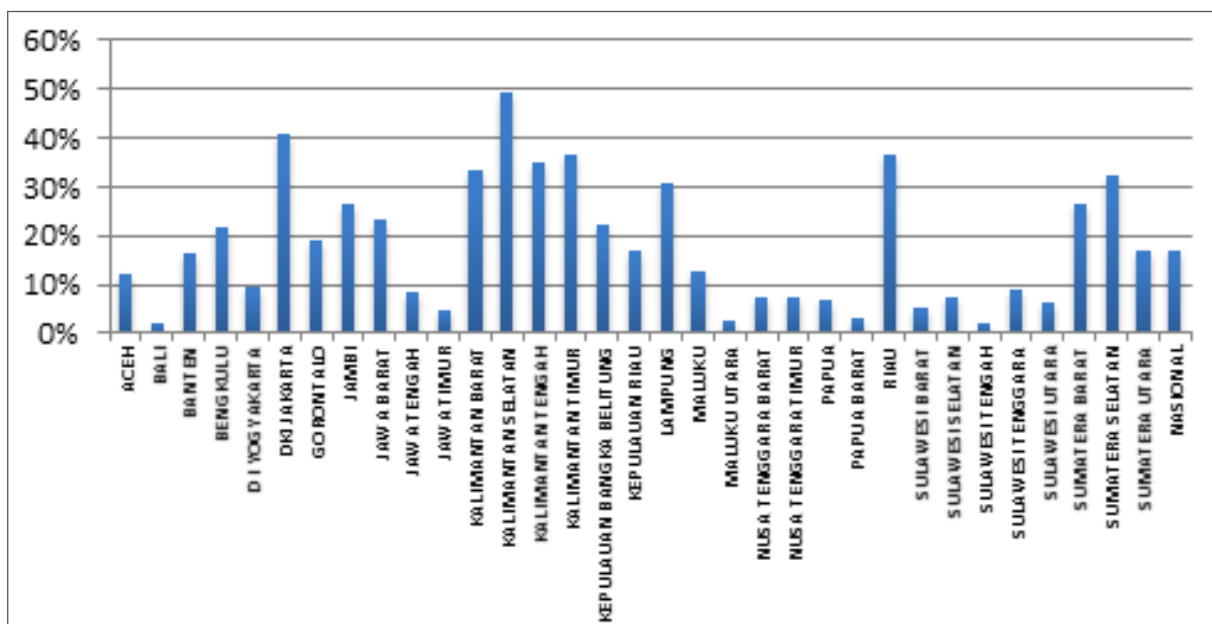


Kedua, informasi penting dari data pemantauan adalah masalah sosialisasi. Rumah tangga miskin tidak paham bahwa KPS dapat digunakan untuk mendapatkan BSM dan berapa anggota keluarga yang dapat memperoleh BSM melalui KPS tersebut. Dari data pemantauan terungkap di bulan oktober 2013 bahwa hanya 32.8 persen rumah tangga penerima KPS/Kartu BSM yang menyerahkan kartu tersebut ke sekolah. Padahal di daerah sample sekitar 85 persen rumah tangga sudah menerima KPS/Kartu BSM dari petugas pos pada saat itu.

Ketiga, adalah keakuratan data. Data pemantauan menunjukkan sekitar 95 persen kartu berhasil didistribusikan pada desember 2013. Ini menunjukkan bahwa kualitas data nama dan alamat adalah cukup baik. Ketepatan data rumah tangga miskin baik nama maupun alamat penting sekali untuk memastikan kartu tiba di rumah tangga miskin yang dituju (ketika kartu didistribusikan).

Keempat, proses rekapitulasi dan verifikasi. Rekapitulasi yang ada saat ini masih manual. Pencatatan seperti ini memungkinkan adanya kesalahan entry data (lihat Gambar 3.4), seperti salah mencantumkan nomor KPS hingga adanya data ganda (siswa yang sama didaftarkan dua kali). Nomor KPS yang jumlahnya 16 digit memerlukan sebuah sistem *entry data* yang baik yang meminimalkan kesalahan dan mudah baik bagi sekolah/madrasah maupun Dinas Pendidikan/ Kankemenag. Hasil pemantauan permasalahan di lapangan ini kemudian dapat menjelaskan rendahnya proses rekapitulasi kartu yang dikirimkan oleh masyarakat pada waktu itu.

Gambar 3.4. Persentase Data Ganda Penerima BSM untuk Siswa SMP di Beberapa Provinsi



Apa Kebijakan yang diambil berdasarkan data pemantauan?

Berdasarkan data pemantauan, ditemukan bahwa ada masalah dalam sosialisasi sehingga terjadi berbagai hambatan dalam proses bisnis BSM yang baru, oleh karenanya TNP2K kemudian memutuskan untuk meningkatkan kegiatan sosialisasi BSM. Studi World Bank tentang BSM (2012) menunjukkan bahwa alokasi anggaran operasional untuk program ini sangat kecil. Hal ini membuat cakupan kegiatan untuk sosialisasi, manajemen penanganan pengaduan, serta pemantauan dan evaluasi menjadi sangat terbatas. Proses sosialisasi BSM bergantung pada proses Rapat Koordinasi (Rakor) yang melibatkan perwakilan seluruh Dinas Pendidikan serta Kantor Kemenag Kabupaten/Kota dan Provinsi. Pemantauan Pelaksanaan upaya perbaikan BSM selama tahun 2012 dan 2013 memberi banyak masukan kepada TNP2K tentang mekanisme sosialisasi yang efektif di level masyarakat. Ketika KPS dan Program P4S diluncurkan pertengahan tahun 2013, TNP2K berdasakan informasi dari pemantauan program merekomendasikan perbaikan dalam strategi komunikasi dan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan para pemangku kepentingan tentang mekanisme baru BSM menggunakan kartu, mekanisme pelaporan kartu dan mekanisme pembayaran dana BSM. Beberapa kegiatan dilakukan untuk membantu kementerian pelaksana BSM dalam memperbaiki strategi sosialisasi mekanisme baru BSM, diantaranya adalah dengan bekerja sama dengan jaringan radio daerah dengan pendengar masyarakat kelas sosial ekonomi rendah. Melalui skema ini, TNP2K menyiarkan iklan layanan masyarakat yang isinya menginformasikan mekanisme pelaporan KPS untuk mendapatkan manfaat BSM. Iklan layanan masyarakat tersebut diputar secara intensif selama 26 hari di 127 kota di Indonesia.



Gambar 3.5. Poster Sosialisasi BSM

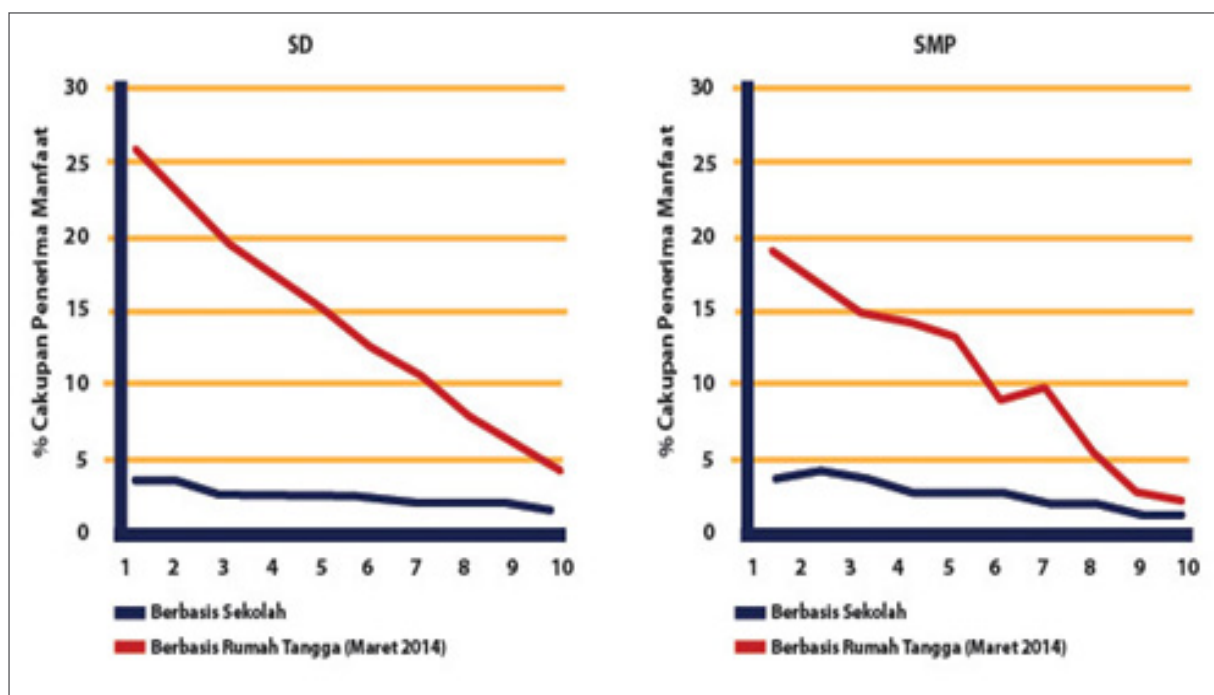
Selain itu, TNP2K bersama Kemendikbud dan Kemenag juga memproduksi poster-poster yang menerangkan cara melaporkan dan mengakses dana BSM (lihat gambar 3.5). Poster-poster itu ditempelkan di sekolah/madrasah, kantor Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama, pasar, maupun di tempat umum lainnya.

Upaya sosialisasi intensif ini berhasil meningkatkan *take-up rate* KPS dan Kartu BSM untuk keperluan BSM secara signifikan. Bulan Juni 2013, *take-up rate* KPS/Kartu BSM masih 4%, maka pada September 2013, *take-up rate* meningkat menjadi 44%. Pada awal 2014, *take-up rate* terus meningkat lagi menjadi 62%.

Pengalaman ini merupakan sebuah pembelajaran penting bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan P4S maupun BSM. Pelaksanaan BSM selama 2013-2014 menunjukkan bahwa sosialisasi intensif dan terfokus mampu membantu membangun pemahaman baru atas perubahan yang terjadi pada sebuah proses yang telah berlangsung sekian lama.

Dengan menggunakan mekanisme pensasaran berbasis rumah tangga (melalui KPS), BSM menjadi lebih tepat sasaran. Hasil perbandingan data Susenas 2009 (BSM dengan mekanisme berbasis sekolah) dan Susenas 2014 (BSM dengan mekanisme berbasis rumah tangga) menunjukkan adanya perbaikan dalam penargetan BSM. Jumlah anak penerima BSM dari desil pengeluaran 1 dan 2 (rumah tangga 20% paling miskin) meningkat, seperti terlihat pada Gambar 3.6.

Gambar 3.6. KPS Memperbaiki Kinerja Penetapan Sasaran



Pemantauan Studi Rintisan Perbaikan Program: Studi Kasus Raskin

Apa yang disebut dengan studi rintisan program Raskin?

Program Raskin merupakan program penting dalam melindungi kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan, mengingat nilai konsumsi beras merupakan komponen pengeluaran terbesar dalam pengeluaran rumah tangga miskin. Namun, walaupun penting, hasil temuan dari beberapa studi menunjukkan bahwa program Raskin tampaknya belum seefektif yang diharapkan. Belum optimalnya efektivitas Raskin ditunjukkan dengan fakta bahwa rumah tangga sasaran menerima Raskin rata-rata sepertiga dari yang seharusnya dan membayar harga tebus Raskin lebih tinggi dari yang seharusnya. Permasalahan lain yang juga sering muncul dalam pelaksanaan program Raskin adalah keterlambatan penyaluran, pemotongan/ kebocoran Raskin, dan masalah kualitas Raskin yang bersumber dari 'sisi penyediaan' Raskin.

Uji coba perbaikan penargetan Raskin—yang dilakukan pada pertengahan 2012—mencoba memperbaiki kinerja penargetan program Raskin, agar dapat diterima utamanya oleh kelompok masyarakat yang disasar dalam kuantitas (kg) dan harga tebus yang mendekati ketentuan. Uji coba pada tahun 2012 mencakup penggunaan kartu Raskin bagi rumah tangga penerima manfaat, publikasi Daftar Penerima Manfaat (DPM) dan sosialisasi. Keseluruhan komponen uji coba ini ditujukan agar masyarakat desa mengetahui rumah tangga yang berhak menerima Raskin dan rumah tangga penerima manfaat mengetahui haknya.

Bagaimana memantau implementasi perubahan Program Raskin 2012?

Penggunaan kartu dan daftar penerima manfaat (DPM) Raskin ini bersifat rintisan akan tetapi diimplementasikan secara luas, oleh karenanya studi pemantauan dirancang dengan cukup intensif, terdapat 3 sumber utama data pemantauan. Pertama, Di 11 provinsi dilaksanakan serangkaian survei rumah tangga untuk melihat respon masyarakat dan pemangku kepentingan raskin di tingkat lokal terhadap perubahan ini, Kedua, untuk memperkaya studi terdapat pemantauan dan evaluasi dampak yang dirancang oleh TNP2K dan tim JPAL di beberapa 600 desa/kelurahan. Ketiga, untuk melihat perubahan yang terjadi setelah digunakannya kartu dan DPM di tingkat nasional, TNP2K dan BPS bekerjasama untuk melakukan survei perlindungan sosial pada Maret 2013.

Bagaimana hasil pemantauan perubahan Program Raskin 2012?

Hasil pemantauan proses pelaksanaan uji coba desain baru program Raskin menunjukkan bahwa pelaksanaan uji coba pada tingkat desa masih belum sesuai harapan. Walaupun demikian, data studi pemantauan TNP2K (2012) menunjukkan bahwa di semua daerah uji coba, rumah tangga penerima manfaat cenderung menerima Raskin dalam jumlah kilogram yang lebih tinggi dan membayar harga tebus Raskin yang lebih rendah dibanding di daerah bukan uji coba. Temuan

ini konsisten dengan temuan studi RCT kartu Raskin (2014) dan juga hasil analisis data modul Survei perlindungan sosial. Peningkatan jumlah kilogram Raskin yang ditebus semakin kentara ketika menggunakan sampel masyarakat miskin yang membeli Raskin dengan menggunakan kartu Raskin, seperti dapat dilihat pada Tabel 3.1. di bawah ini.

Tabel 3.1. Perubahan Harga dan Jumlah Beras dengan Penggunaan Kartu Raskin (Sumarto, et.al, 2014)

	Kartu Raskin + Sosialisasi Standar	Kartu Raskin + Sosialisasi Tambahan	Kegiatan Pengawasan	Kegiatan Penawaran
Total biaya per desa (dalam jutaan rupiah)	2,5	9,5	2,9	4,7
Perubahan subsidi bulanan yang diterima per RTS-PM	Rp. 6.597 (23%)	Rp. 10.863 (38%)	(tidak ada perubahan)	(tidak ada perubahan)
Perubahan dalam % RTS-PM yang membeli Raskin	(tidak ada perubahan)	(tidak ada perubahan)	(tidak ada perubahan)	(tidak ada perubahan)
Perubahan harga bagi RTS-PM	Rp. 55/kg (8%)	Rp. 93/kg (14%)	(tidak ada perubahan)	(tidak ada perubahan)
Perubahan jumlah beras bagi RTS-PM	1,11 kg	1,86 kg	(tidak ada perubahan)	(tidak ada perubahan)

Dengan sosialisasi intensif, kartu efektif dalam memberikan manfaat yang lebih besar dengan biaya yang lebih kecil, meningkatkan pengetahuan masyarakat, subsidi yang diterima, dan ketepatan sasaran. Kegiatan penawaran menghasilkan penurunan harga Raskin yang kecil, namun tidak cukup besar dampaknya untuk direkomendasikan sebagai opsi kebijakan.

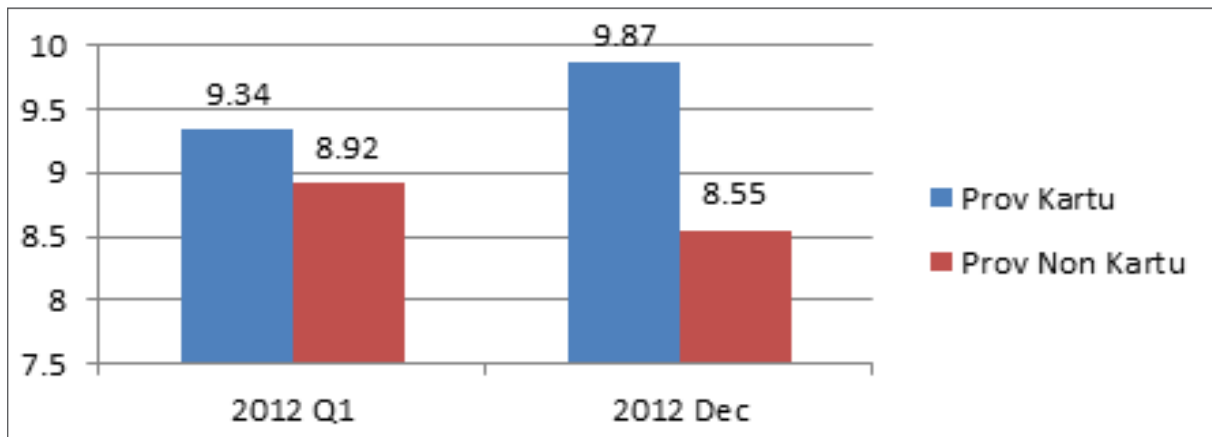
Analisis data Survei Perlindungan Sosial³ kuartal pertama di Maret 2013 pada kelompok rumah tangga dengan pengeluaran per kapita 30 persen terbawah memperkuat temuan pemantauan TNP2K-JPAL di atas. Pada tahun 2012, sepanjang triwulan ketiga sampai bulan Desember terjadi peningkatan jumlah kilogram Raskin yang ditebus di kelompok masyarakat dengan pengeluaran 30 persen terendah khususnya di provinsi-provinsi yang menjadi daerah pilot kartu⁴.

³ Survei Perlindungan Sosial Maret 2013 adalah inisiatif yang dilakukan oleh TNP2K bekerjasama dengan BPS untuk menambah beberapa pertanyaan terkait perlindungan sosial pada Susenas Q1 2013 (dalam bentuk kuesioner terstruktur terpisah) dengan tujuan untuk memantau beberapa uji coba desain baru program penanggulangan kemiskinan, khususnya Raskin dan BSM.

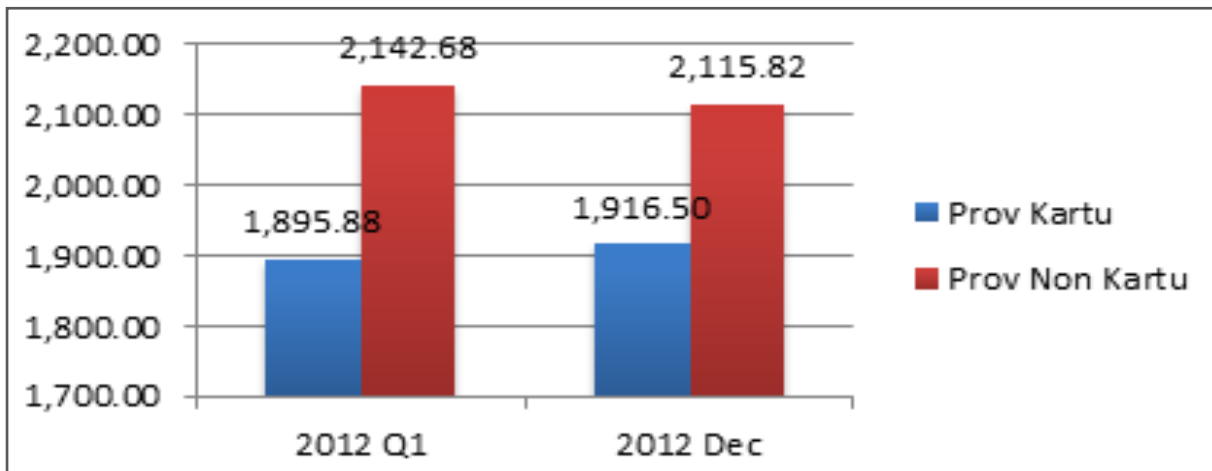
⁴ Salah satu keterbatasan survei perlindungan sosial 2013 yang dilaksanakan melalui *piggy-backing* pada Susenas Q1, maka disagregasi hanya dapat dilakukan sampai tingkat provinsi sehingga dapat relevan untuk merepresentasikan angka secara nasional.



Gambar 3.7. Jumlah Raskin yang dibeli Rumah Tangga (Kg)
 Sumber: Susenas 2012 dan 2013 Q1 (diolah)



Gambar 3.8. Harga Raskin yang dibayarkan (Rp/kg)
 Sumber: Susenas 2012 Q1 dan 2013 Q1 (diolah).

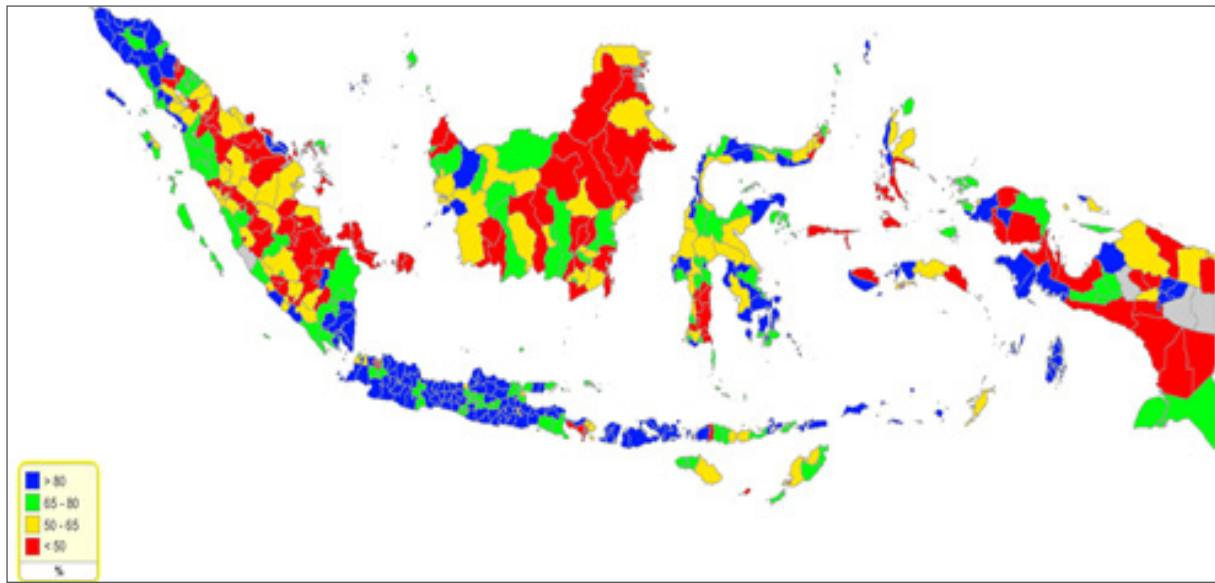


Selain itu, hasil olah data modul Perlindungan Sosial Susenas Maret 2013 juga mengidentifikasi terdapatnya penurunan jumlah kilogram beras yang ditebus, dan peningkatan harga tebus Raskin yang dibayarkan oleh masyarakat, seperti terlihat pada Gambar 3.7 dan 3.8. Hal tersebut terjadi setelah berakhirnya periode berlakunya kartu Raskin Desember 2012. Pada bulan Februari 2013, masyarakat yang menyatakan menggunakan kartu Raskin beserta kupon untuk membeli kartu Raskin hanya menerima 11 kg, 2,2 kilogram lebih rendah dari bulan Desember 2012.

Selanjutnya, Gambar 3.9 memberikan informasi visual mengenai kinerja pensasaran program Raskin di masing-masing provinsi yang dilihat dari berapa persen dari kelompok yang disasar (30 persen termiskin) memperoleh Raskin. Dari peta tersebut dapat dilihat bahwa kinerja penargetan Raskin cenderung rendah di provinsi-provinsi luar Jawa khususnya Sumatera, Kalimantan dan Papua. Di area peta yang berwarna biru, 80 % penerima Raskin adalah rumah tangga miskin (30 persen termiskin), sedangkan area peta berwarna merah kurang dari

60 % penerima raskin di daerah tersebut adalah rumah tangga miskin. Lebih jauh lagi, dari sisi pensasaran program, daerah-daerah di Pulau Jawa cukup baik dalam mensasar rumah tangga miskin akan tetapi jika kita lihat lebih jauh terkait kinerja ketepatan harga dan ketepatan kuantitas daerah di Pulau Jawa relatif kurang baik dibandingkan daerah lainnya.

Gambar 3.9. Peta Kinerja Pensasaran Raskin
Sumber: Susenas 2012



Bagaimana Hasil pemantauan ini dipergunakan dalam membantu memperbaiki kebijakan?

Berbagai temuan pemantauan yang dihasilkan dari data sekunder maupun dari data pemantauan TNP2K menjadi acuan yang penting bagi pemerintah dalam menyusun beberapa kebijakan yang ditujukan untuk memperbaiki kinerja program. Hasil pemantauan penggunaan kartu raskin menjadi titik awal pemerintah dalam merancang kartu perlindungan sosial yang didistribusikan secara nasional pada 15.5 juta rumah tangga di tahun 2013.



Acuan Kunjungan Lapangan Untuk Pemantauan Program

Kunjungan Lapangan sebagai Suatu Bentuk Pemantauan

Mengapa metode kunjungan lapangan paling direkomendasikan?

Pemantauan dapat dilakukan dengan beberapa metode seperti survei, metode partisipatif, analisis anggaran, dan kunjungan lapangan. Namun demikian, untuk keperluan pemantauan program oleh pemerintah, metode kunjungan lapangan lebih sering direkomendasikan. Ada beberapa alasan untuk ini. Selain karena metodologi yang digunakan dalam metode ini relatif sederhana, sumber daya (waktu, dana dan manusia) yang diperlukan juga relatif lebih kecil daripada metode pemantauan lainnya. Dengan persiapan yang matang, kunjungan lapangan juga dapat menghasilkan informasi yang akurat.

Apa yang diharapkan dari suatu kunjungan lapangan?

Kunjungan lapangan dapat diarahkan untuk memenuhi beberapa tujuan, yakni mengidentifikasi kemajuan program; memastikan kinerja pelaksanaan program, apakah berjalan sesuai rencana; mengidentifikasi masalah dalam mencapai tujuan dan sasaran program; memastikan kepatuhan terhadap disain/prosedur yang ditetapkan; dan memastikan penggunaan anggaran yang efektif.

Apa yang bisa dilakukan dalam suatu kunjungan lapangan?

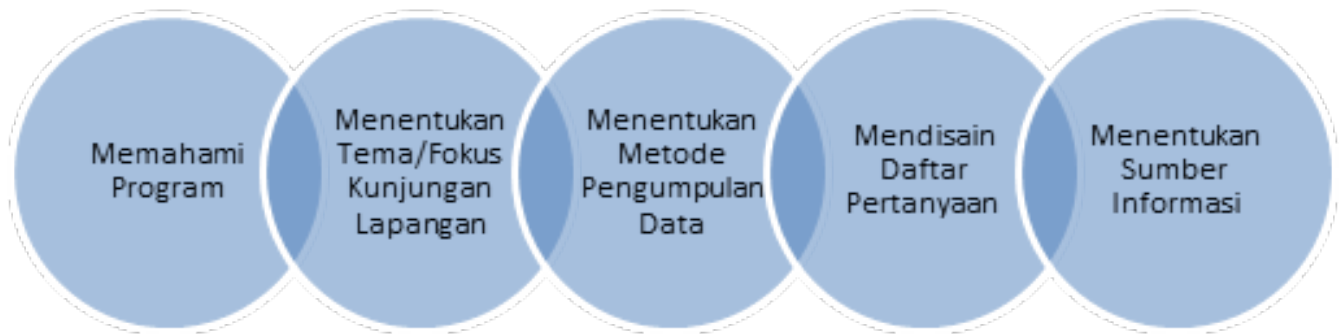
Informasi tentang pelaksanaan program dapat diperoleh dari suatu kunjungan lapangan melalui beberapa aktivitas, meliputi:

1. Wawancara narasumber kunci (*key informant interview*). Wawancara dalam hal ini menggunakan pertanyaan-pertanyaan kunci yang terstruktur untuk dikembangkan lebih lanjut pada saat wawancara dengan kelompok masyarakat.
2. Diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion*). Diskusi dapat melibatkan 8-12 orang dengan latar-belakang yang sama (contoh: penerima atau pelaksana program) dengan topik yang telah ditentukan.
3. Wawancara dengan kelompok masyarakat (*community group interview*). Wawancara ini dilakukan melalui pertemuan terbuka dengan warga masyarakat dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang terstruktur.
4. Observasi langsung (*direct observation*). Pemantau dalam hal ini mengumpulkan informasi dari apa yang dilihat/didengar langsung dari tempat pelaksanaan program tentang segala yang terkait dengan program.
5. Survei kecil (*mini survei*). Caranya adalah dengan melakukan wawancara terbatas dengan penerima program yang disampel secara *random* atau *purposive* dengan menggunakan kuesioner berisikan pertanyaan-pertanyaan tertutup.

Persiapan Kunjungan Lapangan

Ada lima tahapan yang sebaiknya dipertimbangkan oleh tim pemantau dalam mempersiapkan kunjungan lapangan, yaitu dapat dilihat pada gambar 4.1 di bawah ini.

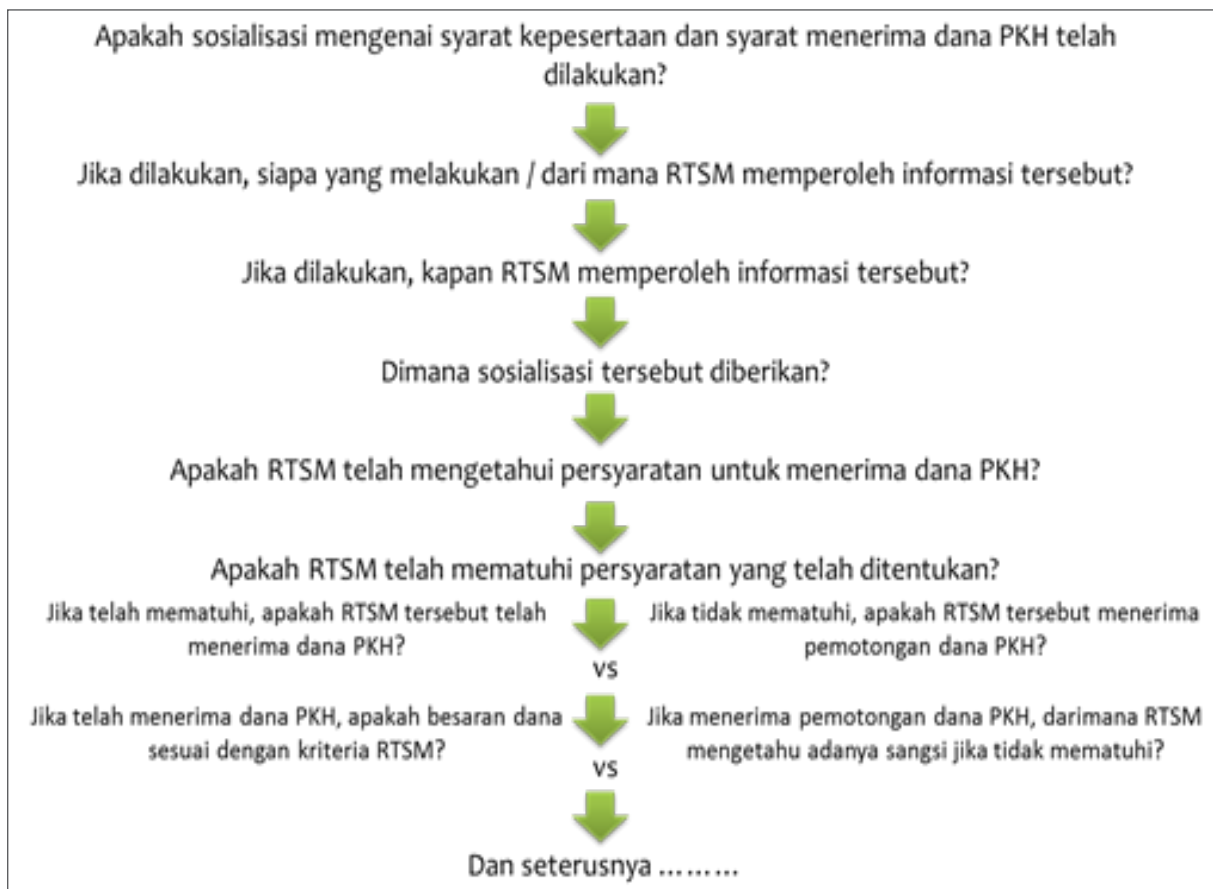
Gambar 4.1. Bagan persiapan kunjungan lapangan



Pertama, pemahaman terhadap program yang akan dipantau menjadi salah satu tahapan penting dalam merancang kegiatan pemantauan, dalam tahapan ini tim pemantau mengumpulkan informasi dari berbagai sumber informasi utama seperti tujuan, penerima manfaat dan indikator utama kinerja program dan detail yang relevan terkait dengan implementasi. **Kedua,** setelah mengumpulkan informasi awal terkait program, tim pemantau dapat mengidentifikasi tema/fokus kunjungan lapangan, tema yang dipilih adalah tema yang dianggap paling krusial dalam bisnis proses program tersebut. **Ketiga,** setelah menentukan fokus utama kegiatan pemantauan, maka tim pemantau dapat menentukan metode pemantauan yang sesuai. **Keempat,** setelah metode pemantauan disepakati maka tim pemantau dapat memulai merancang instrumen pemantauan yang berupa alat bantu pemantauan yang terdiri dari serangkaian pertanyaan demi mendapatkan informasi yang objektif terkait kinerja implementasi program tersebut. Alur dan struktur pertanyaan diatur sedemikian rupa sehingga dapat memberikan informasi yang jelas.

Gambar 4.2. dan 4.3 di bawah ini menjelaskan contoh alur pertanyaan yang dapat diajukan dalam proses pemantauan di lapangan beserta contoh instrument pemantauan berupa kuesioner untuk memantau program PKH.

Gambar 4.2. Contoh Alur Pertanyaan



Gambar 4.3. Contoh Kuesioner

9. Jumlah seluruh ART:	10. Jumlah ibu hamil/nifas:	11. Jumlah anak usia <6 th:	12. Jumlah anak usia 7-12 th:
14. Apakah tahu kewajiban penerima PKH? 1. Ya 2. Tidak	15. [JIKA YA] Apa saja?		
DUA PEMBAYARAN TERAKHIR		16. Jumlah yang dibayar (Rp)	17. Apakah pembayaran sesuai dengan seharusnya?
Terakhir Bulan: Tahun:			1. Ya 2. Tidak
Sebelum terakhir Bulan: Tahun:			1. Ya 2. Tidak
Jika PEMBAYARAN TERAKHIR tidak sesuai dengan yang seharusnya			
19. Dari siapa mengetahui hal ini (lingkari semua yang benar)? 1. Fasilitator [nama:] 2. Petugas POS 3. Sesama penerima 4. Lainnya (sebutkan)		20. Kapan mengetahui hal ini? 1. Sebelum pembayaran 2. Sesudah pembayaran	21. Apakah harus merembahkan?

Apakah RTSM telah mengetahui persyaratan untuk menerima dana PKH?
 Jika telah menerima dana PKH, apakah besaran dana sesuai dengan kriteria RTSM?
 Jika menerima pemotongan dana PKH, darimana RTSM mengetahui adanya sanksi jika tidak mematuhi?

Tahap **kelima** persiapan adalah mengetahui sumber informasi kunjungan lapangan, yang terdiri dari narasumber, dokumen dan lokasi yang dibutuhkan. Narasumber yang dipilih sebaiknya meliputi pelaksana dan penerima manfaat program dan pemangku kepentingan lainnya dari program tersebut. Kemudian, dokumen meliputi atribut pendukung informasi untuk menunjang akurasi data yang dikumpulkan melalui berbagai narasumber. Untuk contoh pemantauan program PKH misalnya dokumen yang menjadi data penunjang adalah di antaranya: *Daftar absensi di sekolah, Daftar absensi di Posyandu, Formulir pendaftaran di Puskesmas, KK/KTP, Kartu PKH, KMS, Formulir verifikasi PKH.*

Selanjutnya, lokasi ditentukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut:

1. Sumber daya yang tersedia (waktu, dana dan staf)
2. Adanya masalah yang dikonfirmasi/diobservasi
3. Keterwakilan karakteristik daerah

Pemilihan RTSM di setiap lokasi tetap perlu memperhatikan 'kecukupan jumlah' agar identifikasi potensi masalah dapat dengan baik dilakukan. Dalam melakukan pemantauan lapangan untuk menjaga agar informasi cukup merepresentasikan keadaan di lokasi tersebut, minimal target jumlah rumah tangga yang diwawancarai adalah sebanyak 20 rumah tangga untuk satu kecamatan. Jumlah kecamatan yang dipilih sebagai lokasi pemantauan sebaiknya proporsional dengan jumlah kecamatan yang ada, jika penerima manfaat program tersebar di seluruh kecamatan di kabupaten/kota tersebut maka pilih kecamatan dengan jumlah penerima manfaat terbesar terlebih dahulu, baru kemudian memilih kecamatan yang lain.

Dari setiap kecamatan desa dipilih secara acak. Kemudian di setiap desa tentukan rumah tangga penerima manfaat untuk diwawancarai, seperti halnya dengan menentukan desa yang terpilih, rumah tangga penerima manfaat yang akan diwawancarai sebaiknya di pilih secara acak. Jika diperlukan untuk menambah informasi pemantauan, tim pemantau dapat juga mengumpulkan informasi melalui wawancara dengan Penyedia layanan (Puskesmas/Pustu, Sekolah dan lain-lain) dan pemangku kepentingan lainnya dari program yang sedang dipantau kinerjanya.

Secara spesifik, dokumen apa yang bisa dijadikan sumber informasi dalam suatu kunjungan lapangan?

Informasi awal dalam suatu kunjungan lapangan dapat diperoleh dari beberapa sumber sebagai berikut:

1. Pedoman program/ SOP/Pedum/Juklak/Juknis
2. Rencana kerja dan Indikator Kinerja
3. Laporan berkala perkembangan kegiatan (bulanan, kuartalan, tahunan dan sebagainya)
4. Laporan pengaduan dan temuan lapangan



5. Data MIS (produk aplikasi sistem informasi manajemen)
6. Publikasi (*press release, internet–dashboard*)
7. Laporan Diskusi Kelompok Terarah (FGD)

Informasi awal yang diperoleh dari dokumen-dokumen inilah yang selanjutnya perlu dikonfirmasi atau ditindaklanjuti dalam pengamatan di lapangan.

Bagaimana kunjungan lapangan dilaksanakan?

Dalam pelaksanaannya kunjungan lapangan mencakup beberapa aktivitas, sebagai berikut:

1. Koordinasi dengan Dinas terkait di daerah.
2. Pemetaan masalah dan pengumpulan informasi level dinas.
3. Wawancara narasumber.
4. Penggalan informasi lewat sumber informasi sekunder.
5. Diskusi akhir.

Apa yang tidak boleh dilakukan dalam suatu kunjungan lapangan?

Beberapa hal di bawah ini akan mengurangi kualitas/obyektivitas informasi yang diperoleh dari suatu kunjungan lapangan, dan oleh sebab itu tidak boleh dilakukan, yaitu:

1. Menyimpulkan temuan berdasarkan persepsi pribadi.
2. Memberikan informasi terkait dengan masa depan program yang belum ditetapkan sebagai kebijakan resmi.
3. Membiarkan responden mengisi sendiri isian kuesioner.

Bagaimana cara agar wawancara dalam kunjungan lapangan berjalan efektif?

Beberapa prinsip harus dipenuhi oleh pewawancara dalam melakukan kunjungan lapangan, yaitu:

1. Pewawancara memahami panduan wawancara dan seluruh pertanyaan dalam kuesioner atau arahan pertanyaan.
2. Pewawancara menyepakati terlebih dahulu waktu wawancara dengan responden.
3. Pewawancara bersikap netral dan obyektif.
4. Pewawancara menghindari cara mengajukan pertanyaan yang mengarahkan, menyudutkan, atau membuat malu responden.
5. Pewawancara mengisi sendiri kuesioner wawancara.

Bagaimana cara memperoleh informasi kunci dalam kunjungan lapangan?

Ada beberapa pertanyaan utama yang perlu diajukan oleh pelaku kunjungan lapangan, baik kepada pelaksana program maupun penerima manfaatnya, untuk memperoleh informasi kunci yang dibutuhkan. Pertanyaan-pertanyaan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Kepada Pelaksana Program

1. Apa tujuan utama program tersebut?
2. Kapan program tersebut dimulai, bagaimana progress dan kapan rencana program tersebut berakhir?
3. Berapa anggaran yang telah disediakan untuk mendukung program tersebut? Berapa yang terserap?
4. Apa sasaran dari program tersebut?
5. Berapa banyak kelompok / individu sasaran dari program tersebut?
6. Apa kriteria dari kelompok / individu sasaran dari program tersebut?
7. Apa saja hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan program tersebut?

Kepada Penerima Manfaat Program

1. Apa manfaat program?
2. Siapa saja yang berpartisipasi dalam program? Bagaimana partisipasi perempuan di dalamnya? Bagaimana partisipasi kelompok sasaran lainnya?
3. Bagaimana pendapat mereka tentang program tersebut?

Bagaimana hasil kunjungan lapangan dilaporkan?

Laporan hasil kunjungan lapangan harus diselesaikan segera setelah kunjungan lapangan selesai. Laporan tersebut harus disusun sedemikian rupa sehingga:

1. Sesuai dengan tema kunjungan lapangan.
2. Memberikan gambaran tentang kondisi lapangan secara faktual.
3. Menyajikan informasi dan analisis dengan dukungan sumber-sumber yang relevan.
4. Memaparkan capaian pelaksanaan suatu program atau kegiatan dengan mengacu pada prosedur atau desain awal.
5. Memberikan informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan selanjutnya.





Inovasi Dalam Melakukan Kegiatan Lapangan

Salah satu tujuan utama dari kegiatan lapangan adalah pengumpulan data untuk memantau situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan. Pada saat dilaksanakannya pemantauan, banyak sekali data dan informasi yang akan diperoleh dari narasumber maupun informasi sekunder. Umumnya data-data tersebut tidak terstruktur dan dicatat secara manual. Untuk menghindari hilangnya informasi berharga dari lapangan maka saat ini mulai dikembangkan alat bantu pengumpulan data elektronik berbasis aplikasi dalam telepon pintar dan sabak elektronik sarana pencatatan untuk kegiatan lapangan.

Aplikasi pemantauan berbasis telepon pintar dan sabak elektronik yang dikembangkan oleh TNP2K dirancang untuk melakukan pemantauan secara cepat kinerja tiga program utama pemerintah, yaitu program Raskin, Program BSM, Program KKS dan Pendistribusian Dana Desa. Tim pemantau dapat menggunakan aplikasi tersebut untuk dapat memfasilitasi kegiatan pemantauan dan kunjungan lapangan terkait program program tersebut

Mengapa Menggunakan Ponsel Pintar dan Sabak Elektronik untuk Pencatatan di Lapangan?

Penggunaan ponsel pintar dan sabak elektronik sudah sangat tidak asing lagi pada masyarakat kini. Harga dan biaya ponsel pintar murah dan tersedia di masyarakat luas. Dengan menggunakan alat bantu tersebut, pelaku kunjungan lapangan dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas pada kegiatan lapangan. Berikut manfaat-manfaat pengumpulan data menggunakan ponsel pintar:

- Membuat data yang ada di lapangan menjadi lebih terstruktur. Pertanyaan yang dicatat pada aplikasi pencatatan mengharuskan pelaku kunjungan lapangan untuk mengisi jawaban yang telah didefinisikan sesuai dengan cakupan yang ada.
- Mengurangi proses pencatatan ulang manual dari kertas yang biasanya harus didigitalisasi untuk keperluan analisa.
- Data yang dicatat dapat tersimpan lokal pada ponsel pintar dan juga dapat langsung tersinkronisasi ke internet. Proses ini membuat tingginya ketersediaan data dan pelaku kunjungan lapangan tidak perlu khawatir data tidak tersimpan atau hilang.
- Data pencatatan lapangan dapat cepat dibagikan ke pusat dan juga pelaku kunjungan yang lain.
- Data dapat segera dianalisa, kemudian pemangku kepentingan dapat segera mengambil keputusan terhadap suatu kasus atau masalah yang terjadi pada saat kegiatan lapangan.
- Ukuran yang praktis ponsel pintar dan sabak elektronik mudah dibawa dan tidak tergantung pada infrastruktur lokal.

Pada dasarnya penggunaan ponsel pintar dan sabak elektronik adalah sebagai alat bantu bukan alat pengganti proses pencatatan. Tentunya banyak hal-hal yang tidak dapat dilakukan

elektronik dengan sendirinya. Kualitas dan penilaian pelaku kunjungan lapangan untuk mendefinisikan data-data untuk dicatat pencatatan elektronik yang akan menjadi nilai yang terpenting.

Bagaimana cara memilih aplikasi untuk pencatatan elektronik?

Pemilihan aplikasi sangat bergantung kepada kebutuhan dan keperluan pada kegiatan pemantauan. Pada umumnya, kebanyakan aplikasi pencatatan elektronik mempunyai fungsi yang serupa dan berbasis formulir. Perbedaan biasanya pada fitur-fitur tambahan pada setiap aplikasi. Sebelum menentukan aplikasi yang digunakan, pelaku pemantauan lapangan perlu menentukan data dan indikator apa yang mau dilihat pada laporan akhir. Jika tidak ada indikator yang jelas, disain pertanyaan akan menjadi terlalu luas dan merubah setelah aplikasi telah dibuat akan lebih menghabiskan waktu untuk pembetulan aplikasi. Setelah terdapat indikator-indikator yang jelas, pelaku perlu mencocokkan fitur-fitur yang diperlukan terdapat pada daftar aplikasi yang ada.

Berikut contoh beberapa pertanyaan sebelum memilih sistem pencatatan elektronik:

- Apakah data yang dicatat merupakan data sensitif? Jika ya, apakah data cukup diberi kata sandi atau data harus disimpan pada komputer *server* sendiri?
- Apakah data yang tercatat harus segera dikirim ke server atau nanti setelah kegiatan lapangan selesai?
- *Platform* apa yang akan digunakan pada pencatatan elektronik ini? Seperti ponsel pintar Android atau *feature-phone* seperti Nokia?
- Bentuk laporan seperti apa yang dibutuhkan? Apakah Excel saja atau diperlukan laporan seperti *dashboard*?

Apa saja yang diperlukan untuk membangun aplikasi pemantauan secara elektronik?

Selain tahapan persiapan pelaksanaan pemantauan lapangan yang sudah disinggung di bab 4, untuk pemantauan berbasis elektronik ada beberapa tahapan penting yang perlu dipersiapkan, yaitu persiapan teknis pemantauan, sebagai berikut :

1. Disain Pertanyaan Pemantauan

Membuat semua pertanyaan pemantauan sesuai dengan draf pertanyaan yang sudah dibuat. Setiap pertanyaan yang dibuat dapat diubah disesuaikan dengan jenis pertanyaan seperti teks, angka, pilihan ganda, tanggal untuk membatasi jawaban yang akan dimasukkan oleh pelaku pemantauan di lapangan.

2. Quality assurance terintegrasi dalam aplikasi

Biasanya kondisi kasus lapangan sangat banyak dan cukup dinamis. Pertanyaan-pertanyaan survei lapangan harus dapat menyesuaikan kondisi tersebut dan dibuat semudah mungkin



untuk dijawab oleh responden dengan cakupan jawaban yang sudah ditentukan. Aplikasi telepon pintar dan sabak elektronik yang digunakan harus dapat mengakomodasi keperluan pengujian mutu dan mampu melakukan mekanisme kontrol terhadap kualitas data yang dimasukkan.

3. Pengujian Aplikasi

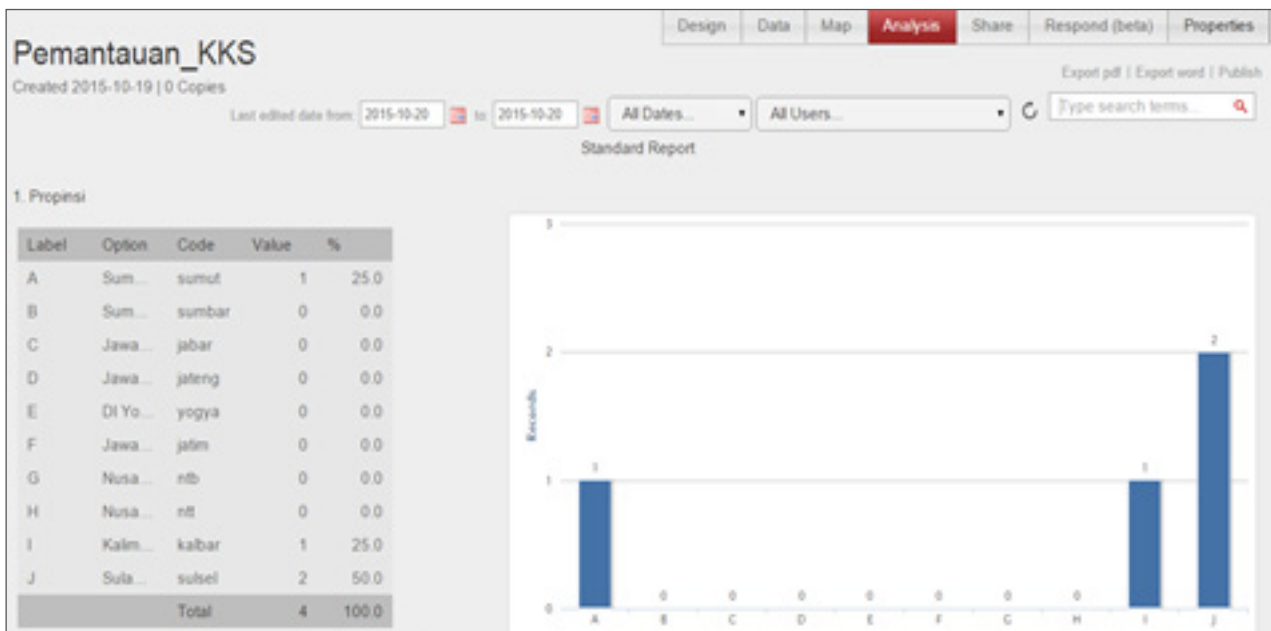
Setelah proses pengembangan pertanyaan dan aplikasi selesai, sebaiknya dilakukan uji coba dengan data contoh untuk memastikan formulir yang dibuat berjalan dengan baik. Hasil dari pengujian akan memberikan umpan balik untuk perbaikan atau penambahan pada pertanyaan sebelum aplikasi mulai dipakai di lapangan.

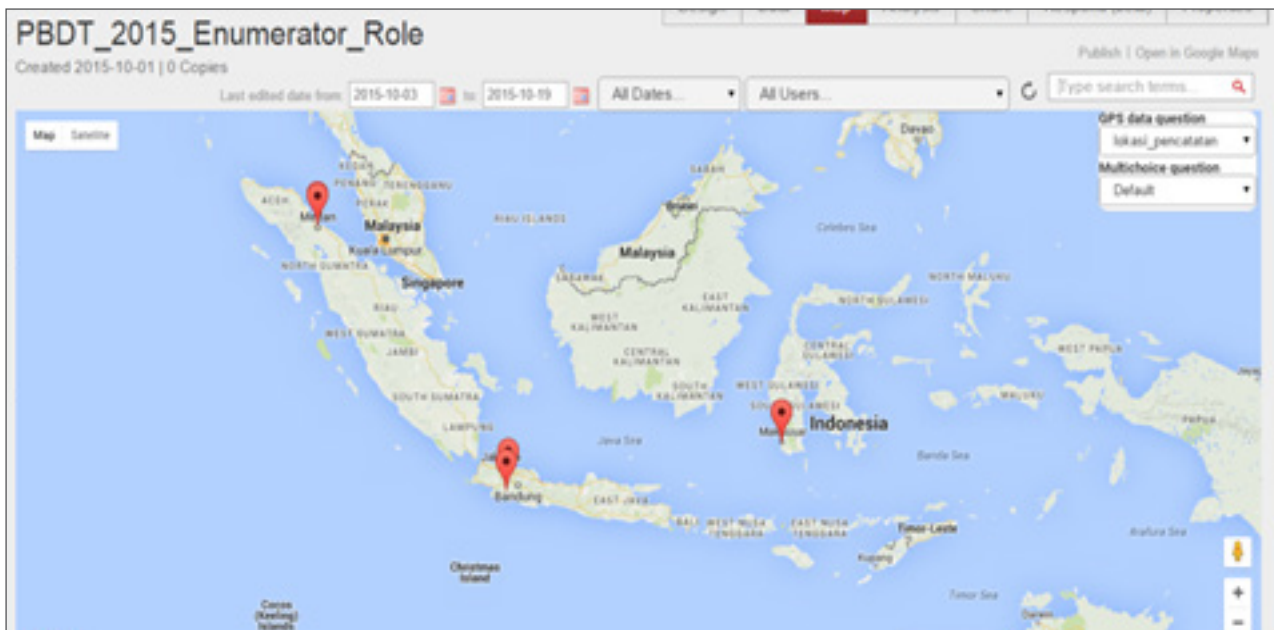
4. Pengumpulan Data

Jika semua pertanyaan dan kasus-kasus pertanyaan sudah diuji coba. Pastikan data-data yang sebelumnya telah dimasukkan dibersihkan dan juga untuk keperluan logistik lapangan seperti baterai tambahan, kartu *sim card* untuk akses internet jika ingin mengupload data lapangan ke server setelah selesai entri data.

5. Dasbor Pemantauan

Data-data lapangan yang sudah diunggah melalui internet dapat segera diunduh untuk analisa. Fitur ini tentunya akan sangat menghemat waktu dan pemberi keputusan untuk segera melakukan aksi tindakan dari hasil analisa data.





Apa Kendala dan Kekurangan Menggunakan Pencatatan Elektronik?

Banyak hal yang dapat dimanfaatkan dengan penggunaan aplikasi pencatatan elektronik. Tetapi di satu pihak, pencatatan elektronik juga memiliki keterbatasan. Pada kasus tertentu, penggunaan formulir kertas bisa lebih cepat, jelas dan produktif dibandingkan dengan formulir elektronik. Contoh pada penggunaan aplikasi ponsel pintar maupun sabak elektronik memiliki ukuran layar yang terbatas. Jika pertanyaan yang dimasukkan sangat banyak dan rumit, tentunya tidak memudahkan pelaku pencatatan di lapangan untuk mengisi formulir dan melakukan wawancara di saat yang sama. Selain itu, perlu diperhatikan alat elektronik selalu memerlukan listrik. Pada saat kegiatan lapangan akses terhadap listrik cenderung terbatas, untuk meminimalkan resiko yang menyebabkan kegiatan terhenti, maka perlu dipertimbangkan untuk membawa alat pendukung seperti pengisi batterai portable pada saat melakukan pemantauan.

Bagaimana Cara Menggunakan Aplikasi Pemantauan Elektronik?

Untuk menggunakan aplikasi pemantauan tim pemantau harus mengunduh aplikasi telepon pintar dari penyedia aplikasi standar, setelah aplikasi diunduh dan aktif di telepon seluler pengguna, diikuti dengan proses identifikasi dengan kata sandi dan nama pengguna. Petunjuk penggunaan alat pemantauan elektronik yang saat ini sedang dikembangkan oleh TNP2K menjelaskan penggunaan alat tersebut secara lebih terperinci

Daftar Pustaka

Bamberger, M., J. Rugh, and L. Mabry. 2006. *Real World Evaluation: Working under budget, time, data, and political constraints*. Thousand Oaks, CA: Sage.

Berg, B. 1998. *Qualitative research methods for the social sciences*. Boston: Allyn and Bacon.

Corbin, J., and A. Strauss. 2008. *Basics of Qualitative Research*. Thousand Oaks, CA: Sage.

Creswell, J. W. 2007. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Thousand Oaks, CA: Sage.

Davies, H.T., S.M. Nutley, dan P.C. Smith. 2000. *What Works? Evidence-based policy and practice in public services*

Kaplan, R. and D. Saccuzzo. 2009. *Psychological testing: Principles, applications, and issues*. Belmont, CA: Wadsworth.

Malterud, K. 2001. "Qualitative research: Standards, challenges, and guidelines." *The Lancet* 358(9280): 483-488. doi: 10.1016/S0140-6736(01)05627-6

Marshall, C., and G. Rossman. 2011. *Designing qualitative research*. Thousand Oaks, CA: Sage.

Maxwell, J.A. 2009. "Designing a qualitative study." dalam L. Bickman and D.J. Rog (eds.) *Applied Social Research Methods*. Thousand Oaks, CA: Sage. 214-253.

Schwandt, T.A. 2007. "Judging interpretations." *New Directions for Evaluation* 114:11-25.

Sumarto, S., "Kebijakan Berbasis Bukti: Memperkuat Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Bangsa". 2015. Materi Presentasi pada Lokakarya Pemantauan dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan, Yogyakarta

Sutcliffe, S. dan J. Court. 2005. "Evidence-Based Policymaking: What is it? How does it work? What relevance for developing countries?" Overseas Development Institute

Tracy, S.J. 2010. *Qualitative quality: Eight "Big-Tent" Criteria For Excellent Qualitative Research*. *Qualitative Inquiry* 16:837-851.

Vaterlaus, J.M. dan B. J. Higginbotham. 2011. "Qualitative Program Evaluation Methods." The Forum for Family and Consumer Issues. <http://ncsu.edu/ffci/publications/2011/v16-n1-2011-spring/vaterlaus-higginbotham.php>

World Bank (2012). Bantuan Siswa Miskin: Cash Transfers for Poor Students Social Assistance Program and Public Expenditure Review



Pemantauan Program Raskin

Kegiatan pemantauan program, termasuk Program Raskin idealnya dilakukan secara rutin dan berkala oleh pengelola program agar hasil pemantauan dapat dipergunakan secara menyeluruh dan efektif sebagai masukan pengendalian pelaksanaan Program Raskin dalam rangka peningkatan kinerja pengelolaan program di berbagai tingkat (mulai dari tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi hingga Pusat).

Instrumen/formulir pemantauan yang tersedia pada Pedum Raskin 2016 adalah untuk pemantauan Raskin ke tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, pelaksana distribusi (desa/kelurahan), RTS-PM, dan Perum BULOG (atau gudang BULOG). Dengan demikian, pengelola Program Raskin (Tim Koordinasi Raskin) pada berbagai tingkatan dapat menggunakan instrumen tersebut sesuai dengan objek/sasaran pemantauan yang akan dipantau. Narasumber sebagai sumber informasi dalam pemantauan Program Raskin meliputi pengelola program (Tikor Raskin Provinsi, Kab/Kota dan Kecamatan), pelaksana distribusi di tingkat desa/kelurahan, penerima manfaat program (RTS-PM), dan Perum BULOG.

Tema dan fokus utama pemantauan rutin dan berkala Program Raskin adalah untuk memotret dan melihat aspek pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing pengelola sesuai dengan yang diatur di dalam pedoman umum Raskin (misal: penyusunan Juklak/Juknis, sosialisasi, pengalokasian APBD, pelaksanaan pemantauan, penanganan pengaduan, dll). Sedangkan tema dan fokus utama pemantauan rutin dan berkala Program Raskin pada tingkatan Pelaksana Distribusi Raskin dan RTS-PM adalah untuk memastikan tercapainya kesesuaian pelaksanaan penyaluran Raskin dengan ketentuan Program Raskin terkait sasaran Penerima Manfaat Program Raskin, jumlah beras Raskin yang ditebus oleh RTS-PM, Harga Tebus Raskin (HTR) yang dibayarkan oleh RTS-PM, waktu penyaluran Raskin, kualitas beras yang diterima RTS-PM dan kelengkapan administrasi pelaksanaan Program Raskin.

Mengacu kepada fokus pemantauan di atas, aspek-aspek pemantauan program Raskin sesuai dengan yang tertuang di dalam masing-masing instrument/formulir pemantauan Program adalah seperti diuraikan di bawah ini:

A. Pemantauan Tingkat RTS-PM, dimaksudkan untuk mendapatkan informasi mengenai:

- a. Frekuensi/waktu penyaluran beras Raskin ke RTS-PM
- b. Alasan/penyebab apabila RTS-PM tidak menebus Raskin
- c. HTR Raskin oleh RTS-PM
- d. Jumlah (Kg) beras Raskin yang ditebus oleh RTS-PM

- e. Lokasi Titik Bagi (TB) atau tempat pengambilan beras Raskin oleh RTS-PM
- f. Penggunaan tanda kepesertaan Program Raskin pada saat pengambilan beras Raskin.

B. Pemantauan Tingkat Pelaksana Distribusi (Desa/Kelurahan), dimaksudkan untuk mendapatkan informasi mengenai:

- a. Jumlah RTS-PM di desa/kelurahan lokasi pemantauan
- b. Proporsi RTS-PM terhadap seluruh populasi rumah tangga di desa/kelurahan
- c. Proporsi RTS-PM yang menebus Raskin terhadap jumlah total RTS-PM Program Raskin di desa/kelurahan
- d. Frekuensi/waktu penyaluran beras Raskin ke RTS-PM
- e. Jumlah (Kg) beras Raskin yang disalurkan ke setiap RTS-PM
- f. Harga Tebus Raskin (HTR) oleh RTS-PM
- g. Biaya operasional penyaluran Program Raskin (di luar HTR Raskin) di desa/kelurahan
- h. Penerimaan DPM Raskin yang diterbitkan oleh Tim Koordinasi Raskin Pusat dari kecamatan atau kab/kota
- i. Perubahan RTS-PM di desa/kelurahan dan mekanisme perubahannya
- j. Harga beras di pasaran setempat yang kualitasnya setara dengan beras Raskin
- k. Penolakan atas beras Raskin yang disalurkan oleh Perum BULOG dan alasannya
- l. Bentuk kemasan beras Raskin yang disalurkan oleh Perum BULOG (15 atau 50 Kg)
- m. Kemungkinan pengemasan kembali (rebagging) beras Raskin oleh desa/kelurahan dan sumber pembiayaannya

C. Pemantauan Tingkat Kecamatan, dimaksudkan untuk mendapatkan informasi mengenai:

- a. Penerimaan penetapan pagu dari kab/kota
- b. Penerimaan data DPM Raskin yang diterbitkan oleh Tim Koordinasi Raskin Pusat dari kab/kota
- c. Kemungkinan terjadinya relokasi pagu antar desa/kelurahan di kecamatan lokasi pemantauan
- d. Pelaksanaan sosialisasi Program Raskin di kecamatan
- e. Kemungkinan terjadinya tunggakan pembayaran HTR di kecamatan
- f. Penerimaan Juknis dari kab/kota dan pelaksanaan sosialisasi Juknis di kecamatan
- g. Penerimaan dokumen perubahan RTS-PM (FRP) dari desa/kelurahan dan pelaporannya ke kab/kota
- h. Pelaksanaan pemantauan pelaksanaan Program Raskin oleh Tim Koordinasi Raskin Kecamatan
- i. Pelaksanaan penanganan pengaduan oleh Tim Koordinasi Raskin Kecamatan
- j. Pelaksanaan pelaporan dari Tim Koordinasi Raskin Kecamatan kepada Tim Koordinasi



Raskin kabupaten/kota

D. Pemantauan Tingkat Kabupaten/Kota, dimaksudkan untuk mendapatkan informasi mengenai:

- a. Ketersediaan, besaran alokasi APBD serta peruntukannya untuk mendukung pelaksanaan Program Raskin di kab/kota
- b. Kemungkinan adanya tambahan alokasi pagu (dan besarnya) di luar pagu Raskin kab/kota yang ditetapkan oleh Gubernur
- c. Penerimaan penetapan pagu kab/kota dari Gubernur
- d. Penerimaan data DPM Raskin yang diterbitkan oleh Tim Koordinasi Raskin Pusat dari provinsi
- e. Pelaksanaan penetapan pagu kecamatan dan desa/kelurahan oleh Bupati/Walikota
- f. Penerbitan SPA oleh Bupati/Walikota
- g. Pelaksanaan sosialisasi Program Raskin
- h. Kemungkinan terjadinya tunggakan pembayaran HTR di kab/kota
- i. Pelaksanaan penyusunan Juknis Program Raskin
- j. Pelaksanaan sosialisasi Juknis Program Raskin
- k. Pelaksanaan pemantauan pelaksanaan Program Raskin oleh Tim Koordinasi Raskin Kab/Kota
- l. Penerimaan dokumen perubahan RTS-PM (FRP) dari desa/kelurahan atau kecamatan
- m. Pelaksanaan penanganan pengaduan oleh Tim Koordinasi Raskin Kab/Kota
- n. Pelaksanaan pelaporan dari Tim Koordinasi Raskin Kab/Kota kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi

E. Pemantauan Tingkat Provinsi, dimaksudkan untuk mendapatkan informasi mengenai:

- a. Ketersediaan, besaran alokasi APBD serta peruntukannya untuk mendukung pelaksanaan Program Raskin di provinsi
- b. Kemungkinan adanya tambahan alokasi pagu (dan besarnya) di luar pagu Raskin provinsi yang ditetapkan oleh Menko PMK
- c. Penerimaan penetapan pagu provinsi dari Menko PMK
- d. Penerimaan data DPM Raskin yang diterbitkan oleh Tim Koordinasi Raskin Pusat
- e. Pelaksanaan penetapan pagu kab/kota oleh Gubernur
- f. Pelaksanaan sosialisasi Program Raskin
- g. Pelaksanaan penyusunan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Program Raskin
- h. Pelaksanaan sosialisasi Juklak Program Raskin
- i. Pelaksanaan pemantauan pelaksanaan Program Raskin oleh Tim Koordinasi Raskin Provinsi
- j. Pelaksanaan penanganan pengaduan oleh Tim Koordinasi Raskin Provinsi
- k. Pelaksanaan pelaporan dari Tim Koordinasi Raskin Provinsi kepada Tim Koordinasi Raskin Pusat

F. Pemantauan ke Sub-Divisi Perum BULOG, dimaksudkan untuk mendapatkan informasi mengenai:

- a. Penerimaan SPA dari Bupati/Walikota
- b. Waktu dan frekuensi penyaluran beras Raskin
- c. Alasan jika tidak menyalurkan beras Raskin setiap bulan
- d. Sistem pembayaran beras Raskin
- e. Lokasi Titik Distribusi (TD)
- f. Kemungkinan adanya permintaan Pemda untuk mengubah TD
- g. Kemungkinan dan alasan terjadinya penolakan atas beras Raskin yang disalurkan oleh Perum BULOG
- h. Mekanisme penggantian beras Raskin apabila terjadi penolakan dari Pelaksana Distribusi Raskin
- i. Pelaksanaan peran pengawasan dari Tim Koordinasi Raskin Kab/Kota khususnya terhadap kualitas beras Raskin yang disalurkan Perum BULOG

Pengecekan daftar dokumen yang ditunjukkan/diterima dari narasumber

(Lingkari 1. Ya atau 2. Tidak)

No.	Dokumen	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Keterangan
1.	Dokumen Pedum Raskin 2016 dan Lembar Informasi & Sosialisasi Program Raskin 2016	1.Ya 2.Tidak	1.Ya 2.Tidak	1.Ya 2.Tidak	1.Ya 2.Tidak	
2.	Dokumen Juklak Provinsi 2016	1.Ya 2.Tidak	1.Ya 2.Tidak	1.Ya 2.Tidak	1.Ya 2.Tidak	
3.	Dokumen Juknis Kab/Kota 2016	1.Ya 2.Tidak	1.Ya 2.Tidak	1.Ya 2.Tidak	1.Ya 2.Tidak	
4.	Dokumen Daftar Penerima Manfaat (DPM) Program Raskin 2016	1.Ya 2.Tidak	1.Ya 2.Tidak	1.Ya 2.Tidak	1.Ya 2.Tidak	
5.	Dokumen SPA 2016	1.Ya 2.Tidak	1.Ya 2.Tidak	1.Ya 2.Tidak		
6.	Dokumen berisi informasi mengenai lokasi TD dan jadwal penyaluran Raskin yang telah disepakati Pemda dengan Perum BULOG	1.Ya 2.Tidak	1.Ya 2.Tidak	1.Ya 2.Tidak		
7.	Dokumen Penetapan Pagu Raskin untuk tingkat kecamatan 2016	1.Ya 2.Tidak	1.Ya 2.Tidak	1.Ya 2.Tidak		
8.	Dokumen FRP hasil musyawarah Desa/Kelurahan atau hasil musyawarah Kecamatan 2016	1.Ya 2.Tidak	1.Ya 2.Tidak	1.Ya 2.Tidak		
9.	Dokumen hasil musyawarah Desa/Kelurahan atau hasil musyawarah Kecamatan 2016	1.Ya 2.Tidak	1.Ya 2.Tidak	1.Ya 2.Tidak		
10.	Dokumen Penetapan Pagu Raskin untuk tingkat provinsi yang diterima dari pusat				1.Ya 2.Tidak	
11.	Dokumen Penetapan Pagu Raskin untuk tingkat kabupaten/kota 2016			1.Ya 2.Tidak	1.Ya 2.Tidak	
12.	Dokumen laporan pelaksanaan Program Raskin		1.Ya 2.Tidak	1.Ya 2.Tidak	1.Ya 2.Tidak	

FORMULIR PEMANTAUAN PROGRAM RASKIN – TINGKAT DESA-KELURAHAN/DUSUN/RT-RW

REKAPITULASI PENYALURAN RASKIN

Prosedur: Cetak kuesioner tabel sebanyak jumlah yang dibutuhkan, lingkari angka untuk jawaban yang sesuai.

PROVINSI		NAMA NARASUMBER	
KABUPATEN		JABATAN NARASUMBER	
KECAMATAN		TELEPON/HP NARASUMBER	
DESA/KELURAHAN		NAMA PEMANTAU	
TANGGAL PEMANTAUAN		JABATAN PEMANTAU	
LEVEL PEMANTAUAN	1. DESA/KELURAHAN	2. DUSUN/RT-RW	TELEPON/HP PEMANTAU

DK1	DK2	DK3	DK4	DK5	Pada Distribusi 3 bulan terakhir,							DK12
					DK6	DK7	DK8	DK9	DK10	DK11	DK12	
Nama Desa/ Dusun/ RW/ RT	Jumlah Rumah Tangga di wilayah ini	Jumlah Rumah Tangga Penerima Raskin (Pagu Raskin di Desa/Kel)	Kapan distribusi Raskin terakhir? (Bln/Thn)	Distribusi 3 bulan terakhir	Apakah ada penyaluran/ pembagian Raskin Pada bulan [..]		Untuk berapa bulan (Bln)	Jumlah Rumah Tangga yang menebus/ membeli Raskin	Apakah Rumah Tangga perlu menunjukkan Kartu Raskin untuk menebus/ membeli Raskin?	Jumlah Raskin yang diterima tiap Rumah Tangga (Kg)	Harga Raskin per Kg (Rp)	Apa desa/kel membayar biaya operasional Raskin dari TID ke TB?
					1. Ya 2. Tidak ↓			1. Ya 2. Tidak		1. Rp 2. GRATIS	1. Ya 2. Tidak	
					1. Ya 2. Tidak ↓			1. Ya 2. Tidak		1. Rp 2. GRATIS	1. Ya 2. Tidak	
				...	1. Ya 2. Tidak ↓					1. Rp 2. GRATIS	1. Ya 2. Tidak	
				...	1. Ya 2. Tidak ↓					1. Rp 2. GRATIS	1. Ya 2. Tidak	

FORMULIR PEMANTAUAN PROGRAM RASKIN – RUMAH TANGGA (RTS-PM)

PROVINSI	TANGGAL PEMANTAUAN	NAMA PEMANTAU	
KABUPATEN	NAMA NARASUMBER	JABATAN PEMANTAU	
KECAMATAN	ALAMAT NARASUMBER	TELEPON/HP PEMANTAU	
DESA/KEKEL	TELEPON NARASUMBER		

Penebusan/pembelian Raskin 3 bulan terakhir (saat pemantauan dilakukan)

B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9
Bulan	Apakah di desa ini ada penyaluran Raskin pada [...]?	Apakah Rumah Tangga (RT) Ibu/Bpk menerima Raskin pada [...]?	Jika tidak, mengapa RT Ibu/Bpk tidak menerima/ menebus? (Kode1)	Jika Ya, Berapa jumlah Raskin yang RT Ibu/Bpk tebus pada [...]?	Berapa jumlah uang yang RT Ibu/Bpk bayarkan untuk Raskin yang ditebus/dibeli pada [...]?	Pada bulan [...], untuk berapa bulan Raskin yang disalurkan?	Dimana RT /B/S menebus/ membeli Raskin pada [...] (Kode2)	Apakah RT Ibu/Bpk perlu menunjukkan Kartu Raskin untuk menebus/ membeli Raskin?
1.	1. Ya 2. Tidak ↓	1. Ya → B05 2. Tidak	_____ ↓ Bulan Berikutnya	1. _____, _____ L 2. _____, _____ kg	1. Rp. _____ 2. GRATIS	_____ Bulan	_____ _____	1. Ya 2. Tidak 3. Kadang-kadang
2.	1. Ya 2. Tidak ↓	1. Ya → B05 2. Tidak	_____ ↓ Bulan Berikutnya	1. _____, _____ L 2. _____, _____ kg	1. Rp. _____ 2. GRATIS	_____ Bulan	_____ _____	1. Ya 2. Tidak 3. Kadang-kadang
3.	1. Ya 2. Tidak ↓	1. Ya → B05 2. Tidak	_____ ↓ Bulan Berikutnya	1. _____, _____ L 2. _____, _____ kg	1. Rp. _____ 2. GRATIS	_____ Bulan	_____ _____	1. Ya 2. Tidak 3. Kadang-kadang

Kode 1

01. Tidak punya uang
02. Tidak senang dengan kualitas Raskin
03. Tidak memiliki waktu untuk menebus Raskin
04. Tidak mampu menjangkau tempat pennebusan Raskin
05. Merasa ada yang lebih membutuhkan Raskin
06. Pelaksanaan distribusi menghabiskan beras Raskin

Kode 2

01. Aparat desa/kelurahan
02. Ketua RT/Kepala Dusun/Lingkungan
03. Kelompok masyarakat
04. Koperasi
05. Lembaga Perkreditan Desa

06. Toko/warung
10. Lainnya, sebutkan _____
11. TIDAK TAHU

FORMULIR PEMANTAUAN PROGRAM RASKIN – TINGKAT KECAMATAN

PROVINSI		TANGGAL PEMANTAUAN	
KABUPATEN		NAMA PEMANTAU	
KECAMATAN		JABATAN PEMANTAU	
NAMA NARASUMBER		TELEPON/HP PEMANTAU	
JABATAN NARASUMBER		TELEPON/HP NARASUMBER	

RC1	Apakah sudah menerima penetapan pagu Raskin 2016 dari Kab/Kota?	1. Sudah, Bulan <u> </u> / Tahun <u> </u> 2. Belum, sebutkan alasannya _____ → RC3
RC2	Apakah sudah menerima data RTS-PM Raskin 2016 dari Kab/Kota?	1. Sudah, Bulan <u> </u> / Tahun <u> </u> 2. Belum, sebutkan alasannya _____
RC3	Apakah ada relokasi pagu Raskin antar desa/kelurahan di kecamatan ini?	1. Ya 2. Tidak
RC4	Apakah Tikor Raskin Kecamatan telah mensosialisasikan program Raskin 2016?	1. Sudah, Bulan <u> </u> / Tahun <u> </u> 2. Belum, sebutkan alasannya _____ → RC6
RC5	Jika sudah, kepada siapa saja sosialisasi tersebut diberikan? PILIHAN BOLEH LEBIH DARI SATU	a. Lurah/Kepala Desa b. LSM c. RTS-PM d. TKSK e. Lainnya, sebutkan: _____
RC6	Apakah ada tunggakan pembayaran HTR?	1. Ada 2. Tidak ada → RC8
RC7	Jika Ya, apakah Kecamatan ikut menalangi?	1. Ya 2. Tidak
RC8	Apakah Tikor Raskin Kecamatan sudah menerima Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran Raskin 2016?	1. Ya 2. Belum, sebutkan alasannya __ → RC10
RC9	Jika Ya, Apakah Tikor Raskin Kecamatan sudah melakukan sosialisasi Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran Raskin 2016 ke desa-desa/kelurahan yang ada di wilayah ini?	1. Ya 2. Belum, sebutkan alasannya _____
RC10	Apakah Tikor Raskin Kecamatan melaksanakan pemantauan pelaksanaan Program Raskin ?	1. Ya 2. Tidak, sebutkan alasannya _____ → RC14
RC11	Jika Ya, periode pemantauan?	1. Beberapa bulan sekali, <u> </u> bulan sekali 2. Setahun sekali 3. Lainnya, sebutkan _____
RC12	Jika Ya, Pemantauan dilakukan di tingkat mana saja? PILIHAN BOLEH LEBIH DARI SATU	a. Pemantauan di Tingkat Desa/setingkat desa b. Pemantauan di Tingkat Rumah Tangga c. Lainnya, sebutkan _____
RC13	Jika Ya, Apa hal apa saja yang menjadi pemantauan Tikor Raskin Kecamatan ? PILIHAN BOLEH LEBIH DARI SATU	a. Jumlah Raskin di tingkat TD b. Harga Raskin di tingkat TD c. Jumlah Raskin di tingkat TB (RTS) d. Harga Raskin di tingkat TB (RTS) e. Kualitas Raskin f. Ketepatan Sasaran penerima Raskin di RTS g. Ketepatan waktu penyaluran Raskin h. Pemantauan ke Gudang Bulog i. Lainnya, sebutkan _____

FORMULIR PEMANTAUAN PROGRAM RASKIN – SUBDIVRE BULOG

PROVINSI		TANGGAL PEMANTAUAN	
KABUPATEN		NAMA PEMANTAU	
BULOG SUBDIVRE		JABATAN PEMANTAU	
NAMA NARASUMBER		TELEPON/HP PEMANTAU	
JABATAN NARASUMBER			

BL1 Kapan menerima SPA (Surat Permintaan Alokasi) dari Bupati/Walikota? (<i>mintakan salinan dokumen</i>)	A. SPA Awal : Bulan <input type="text"/> / Tahun <input type="text"/> B. SPA Akhir : Bulan <input type="text"/> / Tahun <input type="text"/>
BL2 Kapan Penyaluran Raskin terakhir?	Bulan <input type="text"/> / Tahun <input type="text"/>
BL3 Apakah penyaluran raskin dilakukan setiap bulan?	1. Ya → BL6 2. Tidak
BL4 Jika tidak setiap bulannya, berapa bulan sekali penyaluran raskin dilakukan?	
BL5 Mengapa tidak setiap bulan menyalurkan Raskin?
BL6 Bagaimana sistem pembayaran Raskin dilakukan?
BL7 Di mana lokasi Titik Distribusi (TD) Raskin untuk kota/kabupaten ini (wilayah pemantauan)? PILIHAN BOLEH LEBIH DARI SATU	a. Kecamatan b. Desa/Kelurahan c. Dusun/RT-RW/Lingkungan d. Lainnya, sebutkan _____
BL8 Apakah ada permintaan dari Pemda untuk mengubah lokasi TD?	1. Ya 2. Tidak → BL10
BL9 Jika ya, apakah ada tambahan biaya yang diminta?	1. Ya 2. Tidak
BL10 Apakah ada Raskin yang ditolak/dikembalikan di TD?	1. Ya 2. Tidak → BL15
BL11 Jika ya, apakah alasan penolakan/pengembalian Raskin tersebut? PILIHAN BOLEH LEBIH DARI SATU	a. Kualitas Raskin buruk b. Jumlah Raskin kurang c. Lainnya, sebutkan _____
BL12 Jika Ya, apakah menerima kembali Raskin yang ditolak/dikembalikan tersebut?	1. Ya, sebutkan alasannya _____ 2. Tidak, sebutkan alasannya _____
BL13 Jika Ya, berapa lama waktu penggantian Raskin yang ditolak/dikembalikan tersebut?	<input type="text"/> Hari
BL14 Jika Ya, apakah ada biaya tambahan yang diminta?	1. Ya 2. Tidak
BL15 Apakah ada peran pengawasan dari Tikor Raskin Kab/Kota (khususnya terhadap kualitas beras Raskin)	1. Ya 2. Tidak → STOP
BL16 Jika ada, bagaimana pengawasan tersebut dilakukan?



FORMULIR PEMANTAUAN PROGRAM RASKIN – TINGKAT PROVINSI

PROVINSI		TANGGAL PEMANTAUAN	
NAMA NARASUMBER		NAMA PEMANTAU	
JABATAN NARASUMBER		JABATAN PEMANTAU	
HP NARASUMBER		TELEPON/HP PEMANTAU	

RP1 Apakah ada alokasi APBD untuk Raskin 2016 di provinsi ini?	1. Ya 2. Tidak → RP5
RP2 Jika Ya, berapa besaran alokasi tersebut?	Rp. ▭▭▭▭ . ▭▭▭▭ . ▭▭▭▭ . ▭▭▭▭
RP3 Untuk apa saja alokasi tersebut? PILIHAN BOLEH LEBIH DARI SATU	a. Tambahan alokasi Raskin kepada RTS-PM di luar pagu yang ditetapkan b. Biaya operasional Raskin c. Biaya Pembuatan Kartu Raskin d. Biaya angkut Raskin dari TD ke TB e. Subsidi harga tebus raskin f. Dana talangan raskin g. Biaya Pemantauan Raskin h. Lainnya, sebutkan _____
RP4 Jika ada tambahan alokasi Raskin kepada RTS-PM di luar pagu yang ditetapkan pemerintah pusat, berapa banyak penambahan pagu raskin tersebut?	1. ▭▭▭▭ . ▭▭▭▭ Rumah Tangga 2. TIDAK TAHU 3. Tidak ada tambahan Alokasi Raskin
RP5 Apakah Provinsi sudah menerima penetapan pagu Raskin 2016 dari Pusat?	1. Sudah, Bulan ▭▭ / Tahun ▭▭▭▭▭▭ 2. Belum
RP6 Apakah sudah menerima data RTS-PM Raskin 2016 dari Pusat?	1. Sudah, Bulan ▭▭ / Tahun ▭▭▭▭▭▭ 2. Belum
RP7 Apakah pagu Raskin 2016 sudah ditetapkan oleh Gubernur untuk kab/kota di provinsi ini?	1. Sudah, Bulan ▭▭ / Tahun ▭▭▭▭▭▭ 2. Belum
RP8 Apakah Tikor Raskin Provinsi telah mensosialisasikan program Raskin 2016?	1. Sudah, Bulan ▭▭ / Tahun ▭▭▭▭▭▭ 2. Belum → RP10
RP9 Jika sudah, kepada siapa saja sosialisasi tersebut diberikan? PILIHAN BOLEH LEBIH DARI SATU	a. Tikor Raskin Kab/Kota b. Tikor Raskin Kecamatan c. Lurah/Kepala Desa d. LSM e. RTS-PM F. Lainnya, sebutkan _____
RP10 Apakah Tikor Raskin Provinsi menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Penyaluran Raskin 2016 untuk provinsi ini?	1. Ya 2. Tidak, sebutkan alasannya ___ → RP12
RP11 Jika Ya, Apakah Tikor Raskin Provinsi sudah mensosialisasikan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Penyaluran Raskin 2016 ke kab/kota yang ada di wilayah ini?	1. Ya 2. Belum, sebutkan alasannya_____
RP12 Apakah Tikor Raskin Provinsi melaksanakan pemantauan pelaksanaan Program Raskin ?	1. Ya 2. Tidak, sebutkan alasannya ___ → RP16





Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Jl. Kebon Sirih No. 14 Jakarta Pusat 10110

Telepon : (021) 3912812

Faksimili : (021) 3912511

E-mail : info@tnp2k.go.id

Website : www.tnp2k.go.id